

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH  
(STUDI DI SUNGKAI BUNGA MAYANG)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**IWAN RIADI**

**NPM : 1421020082**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1440 H/2018 M**

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH  
TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH  
( Studi di Sungkai Bunga Mayang)**

Skripsi:

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Iwan Riadi

NPM: 1421020082

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN

Pembimbing I: Prof. Dr. H. Faisal, SH.MH

Pembimbing II: Drs. Henry Iwansyah, M.A

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H/2018**

## ABSTRAK

Bentuk Negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini terentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses Desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagai mana mestinya.

Sejarah pemekaran wilayah dimulai sejak disahkannya UU NO.22 Tahun 1999 Tentang otonomi daerah dan di revisi dengan UU NO.32 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU NO.23 Tahun 2014. Sejak saat itu pemekaran otonomi daerah meningkat tajam yaitu setelah pada masa pasca Orde Baru. Data terbaru yakni tahun 2015 Website Kementrian Dalam Negri menunjukkan sudah terdapat 34 Provinsi dan 416 Kabupaten serta 98 Kota di Indonesia

Isu pemekaran Sungkai Marga Bunga Mayang sebenarnya bukanlah isu yang baru. Isu ini sudah dibangun semenjak tahun 2004, bahkan proposal pengkabupatenan sudah dibuat. Namun proposal tersebut berhenti di tengah jalan. Kini isu tersebut kembali muncul ditandai dengan deklarasi Sungkai Marga Bunga Mayang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai PPKS (Panitia Persiapan Kabupaten Sungkai) Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang sebuah masalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana bentuk upaya persiapan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten?, Apakah Sungkai Bunga Mayang memenuhi syarat untuk dimekarkan menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)”

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Meskipun demikian, penelitian ini didukung dengan sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara kepada narasumber yaitu kepada Tim Persiapan Sungkai Bunga Mayang, Tokoh adat setempat, dan Tokoh Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif yakni dengan menyajikan data secara terperinci dan melakukan penafsiran-penafsiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

**Kata kunci: Tinjauan Hukum Positif, Fiqh Siyasah, Upaya, Pemekaran Wilayah.**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Iwan Riadi  
NPM : 1421020082  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH  
SIYASAH TENTANG UPAYA PEMEKARAN  
WILAYAH (Studi di Sungkai Bunga Mayang).

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Faisal, SH. MH.**  
**NIP.195512251985031002**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**NIP.195812071987031003**

**Mengetahui**  
**Ketua jurusan Siyasah**

**Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.**  
**NIP.195808171993031002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH** (Studi di Sungkai Bunga Mayang), disusun oleh Iwan Riadi, NPM.1421020082, Program Study : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang **Munaqosah** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Senin 9 Juli 2018.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : Drs.H.M. Said Jamhari, M,Kom.I. (.....)

**Sekretaris** : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Penguji I** : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

**Penguji II** : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

**DEKAN**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا  
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar-Ra'ad : 13 : 11)*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah Yang Maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada kedua orang tuaku ayahanda Tajudin, BR. dan Ibunda Rohani, tercinta yang senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan do'a, semangat, dukungan kepada penulis dan selalu mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Kakak dan adik-adik ku tercinta, yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan terhadap saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Kepada teman Almamaterku UIN Raden Intan Lampung Khususnya Siyash Syar'iyyah kela A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Iwan Riadi, lahir pada tanggal 19 Oktober 1995 di Desa Negararatu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Anak keempat dari tujuh bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Tajudin, BR dan Ibu Rohani. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Negararatu (Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2003
2. SDN 01 Negararatu (Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2008
3. SMP N01 Negararatu (Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara) lulus tahun 2011
4. SMAN 01 Negararatu (Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara) lulus pada tahun 2014
5. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institute Raden Intan Lampung yang sekarang telah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi antara lain:
  - a. Ketua Hikamsai tahun 2014-2016
  - b. Anggota LMND tahun 2015-2016



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul .....	1
B. AlasanMemilihJudul .....	3
C. LatarBelakangMasalah .....	4
D. RumusanMasalah.....	10
E. Tujuan dan ManfaatPenelitian .....	10
F. MetodePenelitian .....	11

### BAB II PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Hukum Positif Tentang Pemekaran Wilayah .....	15
B. Perspektif Siyasah Tentang Pemekaran Wilayah .....	29

### BAB III UPAYA PEMEKARAN WILAYAH DI SUNGKAI BUNGA MAYANG

A. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Sungkai Bunga Mayang.....	40
1. Wilayah Serata Batas-Batas Sungkai Bunga Mayang .....	40
2. Geografi dan Demografi .....	50
3. Pemerintahan .....	55
4. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat.....	57

5. Transportasi dan Komunikasi .....	72
B. Upaya Pemekaran Wilayah Dan Perkembangannya .....	73

#### **BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH SINGKAI BUNGA MAYANG**

A. Penilaian Berdasarkan Syarat Administratif .....	79
B. Penilaian Berdasarkan Fisik Kewilayahan .....	85
C. Analisis Fiqh Siyasa .....	93

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)”**Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut:

##### **1. Tinjauan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>

##### **2. Hukum Positif**

Hukum Positif Adalah Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegakkan oleh atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam negara indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://kamusbesar.com>, (diakses pada 5 April 2018)

<sup>2</sup> [Unpas Hukum.blogspot.com](http://Unpas.Hukum.blogspot.com), (diakses pada 5 April 2018)

### **3. Fiqh Siyasah**

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>3</sup>

### **4. Upaya**

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksut, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

### **5. Pemekaran Wilayah**

Pemekaran wilayah diartikan sebagai pembentukan daerah otonomi baru yang (salah satu) tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang upaya persiapan masyarakat untuk menjadi kabupaten ditinjau dari hukum positif dan fiqh siyasah siyasah.

---

<sup>3</sup> A.Dijazuli. *Fiqh Siyasah*, (Prenada Media, Jakarta. 2000), hlm.42

<sup>4</sup><http://rubrikabahasa.wardapress.com>.(Diakses pada 5 April 2018)

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Masalah pemekaran wilayah sangat penting karna berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Seringkali terjadi pemekaran wilayah tidak didasarkan oleh kelayakan melainkan keinginan elit politik.
- c. Apabila suatu wilayah terlalu luas sudah semestinya dimekarkan kembali guna mempercepat pembangunan.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Permasalahan ini belum ada yang membahas khususnya di fakultas Syariah UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- b. Tema kajian sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni yakni jurusan siyasah (SY).
- c. Bahan atau informasi yang berkaitan dengan topik banyak tersedia dan mudah didapat sehingga penulis optimis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini.



### C. Latar Belakang Masalah

Bentuk negara yang digunakan di Indonesia adalah bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi.<sup>5</sup> Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan Pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut.<sup>6</sup> Penggunaan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan dengan adanya pembagian daerah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 amandemen kedua pasal 18. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari Pusat ke Daerah Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh legislatif, dan eksekutif saja. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam

---

<sup>5</sup>Josep Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2002),hal 6.

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, *Administrasi Pemerintah Daerah*, Cet ke-5 (Jakarta Universitas Terbuka,2011), hal.5.

<sup>7</sup> Penjelasan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tahun jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan pusat.

Pemekaran merupakan pemecahan dari daerah satu otonom menjadi dua daerah otonom baru sejatinya di tunjukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, namun faktanya sejak tahun 1999, ada 205 daerah yang dimekarkan. Hasil evaluasi kemendagri tahun 2011, terdapat 80 persen daerah otonom baru gagal berkembang.<sup>8</sup> Berlakunya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi syarat pembentukan daerah otonom baru semakin di perketat sebelumnya dalam PP No.78 tahun 2007 tentang pembentukan penghapusan dan penggabungan daerah mengatur mengenai proses daerah yang didasari pada 3 persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Semenjak disahkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan syarat pembentukan daerah otonom baru semakin diperketat yaitu melalui tahapan menjadi daerah persiapan dulu atau daerah administrasi selama 3 tahun. Kinerja kepala daerah selama masa persiapan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur apakah wilayah yang bersangkutan layak untuk dimekarkan atau tidak.

Sejarah pemekaran wilayah dimulai sejak disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan di revisi dengan UU No.32 tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU No. 23 tahun 2014. Sejak saat itu pemekaran daerah otonom

---

<sup>8</sup><http://otda.kemendagri.go.id/index.php/categoryblog/1479-kemendagri-ancam-hapus-daerah-otonomi-yang-gagal> (diakses 5 April 2018)

meningkat tajam yaitu setelah pada masa pasca Orde Baru. Data terbaru yakni tahun 2015 dalam website Kementrian Dalam Negeri menunjukkan sudah terdapat 34 provinsi dan 417 kabupaten serta 98 kota di indonesia.<sup>9</sup>

DPR memberi prioritas bagi daerah-daerah perbatasan yang secara geografis jauh dari ibu kota kabupaten. Hal tersebut bertujuan untuk memperpendek jalur koordinasi antara pusat pemerintahan dengan rakyat. Meraknya pemekaran daerah juga didorong motif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan akibat wilayah yang luas, sebaran penduduk yang tak merata.

Salah satu upaya untuk memisahkan diri ini adalah Sungkai Bunga Mayang yang ingin memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Utara. Di wilayah Lampung Utara terdapat 23 kecamatan, ke-23 kecamatan tersebut, yaitu: Kecamatan Abung Barat, Kecamatan Abung kunang, Kecamatan Abung Pekurun, Kecamatan Abung Selatan, Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan Abung Tengah, Kecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Belambangan Pagar, Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Hulu Sungkai, Kecamatan Kotabumi, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kecamatan Kotabumi Utara, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Tengah, Kecamatan Sunkai Utara, dan Kecamatan Tanjung Raja. Dari ke-23 kecamatan tersebut terdapat 8(delapan) kecamatan yang diprioritaskan untuk membentuk kabupaten baru. Kedelapan

---

<sup>9</sup><http://kemendagri.go.id/pages/data-wilayah>. (diakses 5 April 2018)

kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Hulu Sungkai, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Sungkai Tengah, dan Kecamatan Sungkai Utara.

Dilihat secara administratif, pemerintahan kabupaten mendukung penuh untuk pemekaran Sungkai Bunga Mayang seperti DPRD kabupaten sudah memparipurnakan proposal pengkabupatenan Sungkai Bunga Mayang, bahkan pemerintah kabupaten sudah meneruskan proposal pengkabupatenan ke tingkat Provinsi,

Jika dilihat dari hukum positif dan fiqh siyasah mengenai pemekaran wilayah ini, secara hukum positif berdasarkan UU No.23 tahun 2014 dalam upaya pemekaran wilayah harus didasari dengan 3 persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Sedangkan secara fiqh siyasah perluasan wilayah tidak diatur secara teoritis dimana pada zaman Rasulullah Saw perluasan wilayah dilakukan oleh para sahabat guna memperluas wilayah islam, sedangkan perluasan wilayah itu sendiri dalam islam itu harus membawa kemaslahatan seperti mensejahterakan rakyat.

Kebenaran yang ada dilapangan mengenai upaya perluasan wilayah Sungkai Bunga Mayang, menurut asumsi penulis bahwa Sungkai Bunga Mayang Sudah Layak untuk dimekarkan, karna sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi kabupaten baru.

Isu pemekaran Sungkai Bunga Mayang sebenarnya bukanlah isu yang baru muncul. Isu ini sudah dibangun semenjak Tahun sembilan puluhan dan bahkan

pada tahun 2004 proposal pengkabupatenan sudah dibuat dan masuk ke meja Provinsi. Namun proposal tersebut mandeg dan berhenti di tengah jalan karena ada beberapa persyaratan yang dianggap kurang dan secara politis tidak menguntungkan. Walaupun keinginan menjadikan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten tidak terwujud pada waktu itu, tapi isu dan keinginan tersebut tidak pernah berhenti dan tetap berjalan sampai saat ini, bahkan proposal pengkabupatenan sudah di tembuskan ke meja Provinsi terakhir pada tgl 23 Januari 2017.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi keinginan pemisahan dari kabupaten Lampung Utara. *Pertama*, Kondisi geografis Lampung Utara yang luas menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran, jika wilayah suatu daerah terlalu luas maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah suatu daerah hendaknya menyediakan pelayanan yang sama kepadaseluruh masyarakat di daerahnya, wilayah yang sangat luas dapat menyebabkan tingginya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Begitupun dengan masyarakat terpencil yang jauh dari Kota harus menempuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien. *Kedua*, Pembangunan yang tidak merata, pembangunan di desa tidak berkeadilan. Seperti misalnya pembangunan jalan raya di desa masih banyak di daerah terpencil di Sungkai, jalan rayanya yang belum di aspal masih tanah dan apabila terjadi hujan seringkali terjadi banjir dan mengakibatkan jalan semakin



tambah parah, selain pemerataan jalan alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas bisa dikatakan minim, hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengeluh apabila tertimpa penyakit dimna harus di bawa ke Rumah Sakit yang ada di kota atau Pusat sedangkan jarak tempuh dari desa terpencil ke kota sangatlah jauh di tambah dengan keadaan jalan yg kurang memadai, disinilah terkadang pemerintah cenderung hanya memperhatikan wilayah yang dekat dengan kota sedangkan daerah yang jauh kurang mendapatkan perhatian.*Ketiga*, kekayaan alam Lampung Utara yang melimpah tidak sebanding dengan Kondisi yang ada di Lampung Utara.*Keempat*, Sungkai Bunga Mayang dirasa sudah bisa untuk di jadikan sebuah wilayah kabupaten, karna Sungkai memiliki 8 kecamatan, dimna yang terdapat dalam UU No.23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah untuk menjadi sebuah kabupaten minimal memiliki paling sedikit 5 kecamatan.

Masalah pemekaran wilayah dalam kajian fiqh siyasah tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian, peraktek pemekaran wilayah bukan barang baru dalam sejarah peradaban islam. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa sejarah Rasullah Saw masih hidup upaya perluasan wilayah ini telah dilakukan melalui ekspedisi yang beliau perintahkan, masalahnya sekarang adalah bagaimana upaya pemekaran wilayah yang terjadi dimasa sekarang dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum islam.?

Dengan adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi di Sungkai Bunga Mayang)”**

#### **D. Rumusan Masalah**

Suatu perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak di teliti oleh penulis, dengan demikian diharapkan memberikan arah pembahasan yang jelas dan menentukan pemecahan yang tepat serta mencapai tujuan yang diinginkan. Maka berdasarkan uraian pada latar belakang penulis ini, rumusan masalahnya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Upaya Persiapan Sungkai Bunga Mayang Menjadi Kabupaten ?
2. Apakah Sungkai Bunga Mayang memenuhi syarat untuk dimekarkan menurut Hukum Positif dan fiqh siyasah ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya persiapan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten.
- b. Untuk mengetahui kelayakan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi peneliti disamping untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, juga dapat dijadikan sebagai ajang

untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama ini di bangku kuliah dalam peraktek yang terjadi di lapangan.

- b. Secara praktis, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintahan dalam pembentukan daerah otonom baru Sungkai Bunga Mayang.
- c. Bagi pembaca juga diharapkan dapat menambah pengetahuannya tentang kelayakan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenisnya penelitian ini termasuk jenis *Penelitian Lapangan (field Reaserch)*, yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian. Selain itu penelitian ini juga termasuk jenis penelitian Pustaka (*Library Reaserch*) yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang di perlukan dan dipelajari.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>10</sup>Ahmad Anwar, *Prinsi-Prinsip Metode Reaserch*, (Yogyakarta: Sumbangsih,1975),h.2

Penelitian ini bersifat deskriptif/kualitatif, yakni menyajikan data secara terperinci dan melakukan analisis terhadap kelayakan Sungkai Bunga Mayang untuk menjadi kabupaten sesuai dengan parameter-parameter yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparatur Pemerintahan Kabupaten yang terkait dalam upaya pemekaran. Tetapi karena terlalu banyak, maka penulis hanya membatasi pada figur-figur tertentu yang merupakan sampel dan populasi. Adapun figur yang dijadikan sampel adalah tim panitia pemekaran sungkai bunga mayang di ambil 2 orang, tokoh masyarakat 3 orang, tokoh adat 3 orang.

### **4. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.<sup>11</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Data Primer**

Data ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan (*field research*), yaitu data informasi atau hasil wawancara yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal. 144

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari mater, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makal seminar,tulisan lepas,artikel dan sebagainya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara Metode Kepustakaan (*library reseach*) dan Metode penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Metode kepustakaan (*library reseach*), yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder.<sup>12</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukandengan tanya jawab *interviewer* (*penanya*) dengan *interviewee* (*responden*),<sup>13</sup> Dalam hal ini responden adalah semua pihak yang terkait dengan pemekaran daerah terutama tokoh-tokoh yang harus terlibat dalam rencana pemearan Sungkai Bunga Mayang.

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985),hal 42

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),hal15



## **6. Metode Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan berupa data primer berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen penting maupun data skunder yang berasal dari buku-buku referensi diolah secara sistematis, selanjutnya dibahas secara normatif mengenai kelayakan Sungkai Bunga Mayang menjadi kabupaten, metode yang digunakan dalam hal ini metode Induktif.



## **BAB II**

### **PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Ketentuan Hukum Positif Tentang Pemekaran Wilayah.**

##### **1. Dasar Hukum Dan Pengertian Pemekaran Wilayah.**

Dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal pemekaran suatu wilayah atau pembentukan daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.”<sup>14</sup>

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang; kemudian pasal 18 ayat (2) Undang-

---

<sup>14</sup><http://minbar2009.wardapress.com>.”Dasar-dasar Hukum Pemekaran” (Diakses 23 April 2018)

Undang Dasar RI Tahun 1945 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dan ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 yang mengatur: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Dan ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi : (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan. Ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 (1) yang menyebutkan: Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. ayat (2) Penataan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk : (a) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; (c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; (e) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan (f) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. ayat (3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. ayat (4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan. berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan Pembentukan Daerah Pasal 32 ayat (1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa : (a) pemekaran Daerah; dan (b) penggabungan Daerah, dan ayat (2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 49 ayat (1) bahwa Pembentukan Daerah berdasarkan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah Perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.<sup>15</sup>

Pemerintahan daerah bukanlah hal yang baru pada disiplin ilmu ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan daerah yang merupakan wujud dari otonomi daerah serta implementasinya sistem desentralisasi merupakan hal yang sudah sejak lama lahir dan dijamin dalam konstitusi negara. Pemerintahan daerah adalah subbahasan yang terus berkembang dalam pengaturannya, baik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini sudah berulang kali mengalami pergantian landasan yuridisnya.

Berdasarkan historis, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia tidak pernah terlepas dari peran penjajahan Hindia Belanda. Pada masa sebelum kemerdekaan, pelaksanaan itu tidak pernah terlepas dari politik penjajah. Politik pemerintah penjajahan yang menerapkan sistem sentralistik. Sampai saat ini, telah terjadi banyak perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>16</sup>

Sebelumnya ketentuan mengenai pemekaran wilayah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dirasa sesuai dengan amanat konstitusi hasil amandemen, yang menekankan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

---

<sup>15</sup> <http://www.daerahpersiapan.org> (Diakses 23 April 2018)

<sup>16</sup> Dr. Yusnani Hasyimzoem, S.H., M.Hum, et. al. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hal 29-30.

kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Kemudian dengan perkembangan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia seraya didukung pula dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini adalah landasan terbaru dalam pengaturan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hadir dengan pengaturan yang lebih kompleks dan sistematis dalam pengaturan pemerintahan daerah. Segala urusan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, maka terdapat penguatan pengaturan tentang pemerintahan daerah termasuk perihal pemekaran wilayah yang saat ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah dilakukan pemisahan antara pemerintahan daerah, pemerintahan desa,<sup>17</sup> dan pemilu kepala daerah.

Merujuk dari pengertian Pemekaran Wilayah itu sendiri Pemekaran wilayah atau Daerah adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah atau wilayah pemekaran adalah suatu daerah daerah atau wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi

---

<sup>17</sup>.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1(satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

---

<sup>18</sup>.Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah yang berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru harus dilakukan melalui tahapan daerah persiapan<sup>19</sup> yang harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif yang terdiri atas:

## 2. Persyaratan Pemekaran Wilayah

### a. Persyaratan Dasar Kewilayahan

Untuk dapat dimekarkan suatu wilayah, suatu wilayah harus memenuhi persyaratan tertentu yang oleh Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa:

- 1) Luas wilayah minimum; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang diatur di dalam peraturan pemerintah.
- 2) Jumlah penduduk minimum; ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang di atur didalam peraturan pemerintah.
- 3) Batas wilayah; yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
- 4) Cakupan wilayah; cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk membentuk daerah Provinsi, paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.

---

<sup>19</sup>Derah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru

5) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan; dalam pasal 35 ayat (6) ditegaskan bahwa batas usia minimal meliputi batas usia minimal daerah provinsi yaitu 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun sejak tahun pembentukan.

b. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

Dalam pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter berikut ini yaitu:

1. Geografi, dengan parameter:
  - a) Lokasi ibu kota
  - b) Hidrografi
  - c) Kerawanan bencana
2. Demografi, dengan parameter:
  - a) Kualitas sumber daya manusia
  - b) Distribusi penduduk
3. Keamanan, dengan parameter:
  - a) Tindakan kriminal umum

- b) Konflik sosial
- 4. Sosial politik, adat, dan tradisi, dengan parameter:
  - a) Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
  - b) Kohesivitas sosial
  - c) Organisasi kemasyarakatan
- 5. Potensi ekonomi, dengan parameter:
  - a) Pertumbuhan ekonomi
  - b) Potensi unggulan daerah
- 6. Keuangan daerah, dengan parameter:
  - a) Kapasitas pendapatan asli daerah induk
  - b) Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan
  - c) Pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 7. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, dengan parameter:
  - a) Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
  - b) Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
  - c) Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
  - d) Jumlah pegawai sipil di daerah induk
  - e) Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan

Secara Keseluruhan ada beberapa syarat dalam pelaksanaan pemekaran daerah yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Dr. Yusnani Hasyimzoem, S.H.,M.Hum, et. al. *Hukum Pemerintahan Daerah* (jakarta:Rajawali Pers,2017)hal 26-28

c. Persyaratan Administratif

Syarat Administratif, merupakan syarat yang berkenaan dengan persetujuan dalam pemekaran daerah. Adapun bentuk syarat administratif meliputi:

a) Bagi provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri.

b) Bagi Kabupaten/Kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri.

d. Persyaratan Teknis, merupakan syarat yang meliputi faktor yang akan menjadi dasar pembentukan daerah atau pemekaran wilayah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, pertahanan, dan keamanan. Hal ini berarti pemekaran daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas, karena harus mempertimbangkan keadaan kemampuan ekonomi bahwa setelah pemekaran bagaimana nasib atau keadaan ekonomi daerah tersebut, apakah sumberdaya alam daerah dapat menopang pemasukan pendapatan perekonomian daerah, serta apakah daerah memiliki potensi dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri.

e. Syarat Fisik, meliputi persyaratan mengenai jumlah desa atau jumlah kabupaten, kecamatan yang terdapat didalam suatu wilayah atau



daerah tertentu yang akan melakukan pemekaran daerah. Adapun syarat fisik yaitu untuk pembentukan atau pemekaran provinsi maka syaratnya yaitu harus terdiri dari minimal 5 (lima) kabupaten/kota, sedangkan untuk provinsi minimal terdiri atas 5 (lima) kecamatan, dan untuk pemekaran atau untuk pembentukan kota minimal terdiri dari 4 (empat) kecamatan.

### 3. Prosedur Pemekaran

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan

perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut dan menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa jangka waktu yang harus dilalui oleh satu daerah persiapan untuk dibentuk menjadi satu daerah baru adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh karena itu UU No. 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak,

---

<sup>21</sup>Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

<sup>22</sup>Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.<sup>23</sup>

Secara rinci, terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya pemekaran daerah atau wilayah, yaitu.<sup>24</sup>

- 1) Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan utama karna kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim, seperti terjadi pada pemekaran Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Irian Barat.
- 2) Alasan Historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.
- 3) Alasan kultural atau budaya, dimana pemekaran wilayah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.
- 4) Alasan ekonomi, dimana pemekaran daerah dilakukan agar dapat mempercepat pembangunan di daerah.
- 5) Alasan anggaran, pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.
- 6) Alasan keadilan, bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan, yang artinya pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

---

<sup>23</sup>Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

<sup>24</sup>Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2007.

## **B. Perspektif Siyasah Tentang Pemekaran Wilayah**

### **1. Pembagian wilayah dimasa Khulafaur Rosidin**

Masalah pemekaran wilayah dalam kajian fiqh siyasah tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian, peraktek pemekaran wilayah bukan barang baru dalam sejarah peradaban islam. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa sejarah Rasulullah Saw masih hidup upaya perluasan wilayah ini telah dilakukan melalui ekspedisi yang beliau perintahkan. Berikut adalah gambaran perluasan wilayah dalam sejarah Khulafaur Rosidin.<sup>25</sup>

#### **1. Abu Bakar**

Meskipun Abu Bakar r.a tidak banyak melakukan perluasan daerah kekuasaan, akan tetapi beliau berhasil menaklukkan beberapa wilayah:

- 1) Penaklukan Iraq, seperti Mahdhor, Ullais, Nahrud Dain, Anbar dan Ain Tamar oleh Khalid bin Walid (12 H).
- 2) Penaklukan Syam oleh Khalid bin Walid (13 H), yang sebelumnya telah ditekan oleh Khalid bin Sa'id bin Ash.

Dua penaklukan ini adalah penaklukan besar yang terjadi pada masa Abu Bakar r.a meskipun sebenarnya Syam berhasil ditaklukan pada masa awal pemerintahan Umar bin Khattab r.a.

#### **2. Umar bin Khattab**

Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh khalifah Abu Bakar, maka tugas pertama ialah melanjutkan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Maka dari itu, gelombang ekspansi (perluasan wilayah

---

<sup>25</sup> "Sejarah Perluasan Wilayah Khulafaur Rosidin".wordpress.(diakses 23 April 2018)

kekuasaan) banyak terjadi antaranya, ibu kota Syria, Damaskus jatuh tahun 635 M, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah dalam perang Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan 'Amr bin Ash dan ke Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin abi Waqash. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan pada tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh di bawah kekuasaan Islam. Al-Qadasiah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada 637 M. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai.

Bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat. Khalifah telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang berkembang. Umar mendirikan dewan-dewan, Baitul Mal, mencetak uang, mengatur gaji, menciptakan tahun hijriah dan sebagainya.

Disamping itu karena wilayah kekuasaan semakin luas, maka wilayah Islam dibagi menjadi unit-unit administratif, penataan administrasi pemerintahan dilakukan Umar dengan melakukan desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau wilayah Islam yang semakin luas. Wilayah Islam dibagi dalam beberapa propinsi yaitu; Mekah, Madinah, Palestina, Suria, Iraq, Persia dan Mesir. Umar yang dikenal sebagai negarawan, administrator, terampil dan cerdas, segera membuat kebijakan mengenai administrasi pemerintahan.

Pembagian Negeri menjadi unit-unit administratif sebagai propinsi, distrik dan sub bagian dari distrik merupakan langkah pertama dalam pemerintahan. Unit-unit ini merupakan tempat ketergantungan efisiensi administratif yang besar. Umar merupakan penguasa muslim pertama yang mengambil kebijakan dengan melakukan desentralisasi semacam itu. Setiap daerah diberi kewenangan mengatur pemerintahan daerahnya tetapi tetap segala kebijakan harus sesuai dengan pemerintahan pusat.

### 3. Usman bin Affan

Pada masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Di Mesir pasukan muslim diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran terpenting disini adalah "Zat al-Sawari (pertempuran tiang kapal) yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah, antara tentara Romawi yang dipimpin oleh Constantine dengan tentara Muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Sarrah. Dinamakan perang kapal karena banyaknya kapal-kapal perang yang digunakan dalam peperangan tersebut. Disebutkan terdapat 1.000 buah kapal, dan 200 buah kapal milik kaum muslim sedangkan sisanya milik tentara Romawi. Pasukan Islam berhasil mengusir pasukan Romawi dan ini merupakan kemenangan pertama tentara muslim pertempuran di laut. Selanjutnya bergerak dari kota Basrah untuk menaklukkan sisa wilayah kerajaan Sasan di Irak,

dan dari kota Kufah, tentara Muslim menyerbu beberapa provinsi disekitar laut Kaspia.

Dakwah Islam pada masa awal kekhilafahan Utsman Bin Affan menunjukkan kemajuan dan perkembangan signifikan melanjutkan estafeta dakwah pada masa khalifah sebelumnya. Wilayah dakwah Islam menjangkau perbatasan Aljazair (Barqah dan Tripoli sampai Tunisia), di sebelah utara meliputi Aleppo dan sebagian Asia Kecil. Di timur laut sampai Transoxiana dan seluruh Persia serta Balucistan (Pakistan sekarang), serta Kabul dan Ghazni.

Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga dilakukan perluasan wilayah ke Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, dan Tabaristan berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama berhenti sampai disini.

#### 4. Ali bin Abi Tholib

Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima bai'at mereka. Menjadikan Ali satu-satunya Khalifah yang dibai'at secara massal, karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda.



Sebagai Khalifah ke-4 yang memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintah Khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat Muslim terjadi saat masa pemerintahannya, Pertempuran Basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, dan Ummul mu'minin Aisyah binti Abu Bakar, janda Rasulullah. Perang tersebut dimenangkan oleh pihak Ali

Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan (akan terjadi) oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, dan diperparah oleh hasutan-hasutan para pembangkang yang ada sejak zaman Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai di situ, konflik berkepanjangan terjadi hingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Shiffin yang melemahkan kekhalifannya juga berawal dari masalah tersebut.

Ali bin Abi Thalib, seseorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi negara karena kekacauan luar biasa yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Ia meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdrrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij (pembangkang) saat mengimami salat subuh di masjid Kufah, pada tanggal 19 Ramadhan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadhan tahun 40

Hijriyah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain.

Kemudian dengan berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Tholib, maka sistem perluasan wilayah dilanjutkan kembali pada masa Umayyah. Demikian sampai pada masa kita saat ini, perluasan wilayah dalam islam bukan hal yang baru namun sudah diperaktekkan pada masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat.

## 2. Kaidah Ushuliyah yang dapat di pakai dalam pemekaran wilayah

Adapun kaidah yang dapat dijadikan patokan dalam perluasan wilayah, seperti dalam kitab Al-Umm, terdapat pernyataan Asy-Syafi'i yang dapat dikategorikan kaidah fiqh, seperti:

مَنْزِلُهُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلُهُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

*“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”*

وَلَمْ يَحْدَهُ بِحَدِّ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ

*“Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat Yang Batasannya Tidak Ditentukan Secara Tegas”*

Artinya suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *urf* atau *adat*. Meskipun banyak ulama yang membedakan di antara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu *adat* atau *urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut<sup>26</sup>:

- 1) Tidak bertentangan dengan syari'at
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
- 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*
- 5) *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya
- 6) Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

Adapun Qaidah *Adh-Dhararu Yuzaluarti* qaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Dengan kata lain qaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Adapun yang berkaitan dengan ketentuan Allah, sehingga kerusakan itu menimpa seseorang, kedudukannya menjadi lain, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari keimanan terhadap qadha dan qadarnya Allah SWT, karna segala sesuatu menjadi boleh bagi Allah SWT. Dan dari-Nya lah kemanfaatan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Prof.DR.Rachmat Syafe'i, M.A.,Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia,2010),h.291- 292

<sup>27</sup>Prof.DR.Rachmat Syafe'i, M.A.,Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia,2010),h.287-288

Yang menjadi tujuan umum bagi syar'i dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *dharuriyah*(primer)nya, memenuhi kebutuhan *haajiyah* (skunder), serta kebutuhan *tahsiiniyyah* (pelengkap)nya.<sup>28</sup> Adapun pengertian dari ketiga macam kemaslahatan tersebut yaitu<sup>29</sup>:

- 1) Mashlahah *Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara itu. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya lima pokok itu adalah mashlahat dalam tingkat dharuri, karena itu Allah memerintahkan pelaksanaan usaha itu. Setiap hal yang menyebabkan kemusnahan atau kerusakannya adalah keburukan, karena itu Allah melarangnya. Dengan demikian Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- 2) Mashlahah *Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat dharuri. Ia tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar lima pokok yang lima tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan qashar shalat dan berbuka puasa bagi

---

<sup>28</sup>Prof.Dr.Abdul Wahhab Khallaf.,Ilmu ushul fiqh-kaidah hukum islam (Jakarta: Pustaka Amani,2003)h,291

<sup>29</sup>.Amir Syarifuddin "Macam-macam maslahat"tersedia di:  
<http://majelispenulis.blogspot.co.id>(diakses 23 April 2018)

orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, di bolehkan jual beli pesanan (bay' al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar diatas.

- 3) Mashlahah *Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Setiap hukum syara tidak memiliki tujuan kecuali satu diantara tiga hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia ini. Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap serta sekunder tidak diperhatikan jika diperhatikan kepada salah satu dari keduanya dapat merusak kebutuhan primer.

Kaidah ini menjelaskan tujuan umum syar'i dalam pembentukan hukum-hukum syara, baik berupa hukum *taklifi*(pembebanan) maupun hukum *wadh'i* (positif) dan menjelaskan tingkatan hukum berdasarkan tujuannya. Mengetahu tujuan umum syar'i dalam pembentukan hukumnya adalah diantara hal penting

untuk membantu memahami nash-nashnya dengan pemahaman yang benar dan menerapkannya terhadap kejadian, serta mengeluarkan hukum atas peristiwa yang tidak ada nashnya.

Karna petunjuk lafal dan ungkapan kalimat atas makna itu kadang mengandung beberapa tujuan, maka memenangkan salah satu tujuan itu adalah memperhatikan tujuan syar'i, karena sebagian nash itu kadang-kadang lahirnya terdapat kontradiksi, maka untuk menghilangkan kontradiksi dan memadukannya, atau memenangkan salah satunya adalah memperhatikan tujuan syar'i, karena banyak peristiwa yang terjadi dan kadang-kadang tidak tercakup dalam ungkapan nash, sedangkan perlu sekali mengetahui hukumnya dengan dalil syara' yang manapun, maka petunjuk dari pengambilan dalilnya adalah mengetahui tujuan syar'i.

Oleh karena itu penguasa hukum dalam pemerintahan sekarang menggunakan lampiran catatan penjelas yang menjelaskan tujuan dari undang – undang secara umum dan menjelaskan tujuan khusus dari setiap pasal undang-undang tersebut. Catatan penjelasan, semua pembahasan dan perdebatan yang silih berganti ditengah persiapan undang-undang dan penetapannya adalah pertolongan penguasa hukum untuk memahi undang-undang menerapkannya pada nash, jiwa hukum dan memahami logikanya.

Demikian juga hukum-hukum syara' yang tidak dapat dipahami dengan cara yang benar kecuali jika tujuan umum syar'i dapat diketahui dari pembentukan hukum. Dapat diketahui bagian kejadian yang karena kejadian itu

ayat Al-Quran diturunkan, atau datangnya hadis yang berbentuk ucapan maupun perbuatan.<sup>30</sup>

Mengenai kaidah yang dijelaskan di atas jelas bahwa untuk memperluas suatu wilayah harus memperhatikan maslahatnya bagi umat, jangan dalam mengambil suatu keputusan malah banyak mudaratnya.



---

<sup>30</sup>Prof.Dr.Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.h.* 291-292



### **BAB III**

## **UPAYA PEMEKARAN WILAYAH SUNKAI BUNGA MAYANG**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Sungkai Bunga Mayang**

#### **1. Wilayah Serta Batas-Batas Sungkai Bunga Mayang**

Wilayah Sungkai Bunga Mayang terdiri atas 8 wilayah kecamatan, dua kecamatan (Sungkai Utara dan Sungkai Selatan) adalah kecamatan yang telah berusia cukup tua yaitu sejak tahun 1970-an. Sebelumnya dua kecamatan tersebut adalah kecamatan Negararatu atau Ketapang yang berpusat pemerintahan di Negararatu. Sejak dimekarkan menjadi dua kecamatan yang diikuti oleh kebijakan transmigrasi lokal, kini telah terbagi menjadi 8 (delapan) kecamatan. Masing-masing adalah kecamatan Sungkai Utara dengan ibukota Negararatu, Hulu Sungkai dengan ibukota Gedung Makripat, Sungkai Tengah dengan ibukota Batu Nangkop, Kecamatan Sunkai Selatan dengan ibukota Ketapang, Kecamatan Sunkai Jaya dengan ibukota Cempaka Raja, Kecaatan Sungkai Barat dengan ibukota Sinar Harapan, Kecamatan Bunga Mayang dengan ibukota Negara Tulang Bawang, dan Kecamatan Muara Sungkai dengan ibukota Negeri Ujung karang.

Dari riwayat yang berkembang Sungkai merupakan khasanah masyarakat asli Lampung yang termasuk bagian dari masyarakat adat Sungkai Marga Bungamayang. Beberapa bukti kesejarahan yang sampai saat ini terpelihara diwilayah ini maupun yang dipegang oleh warga

Sungkai di perantauan menunjukkan adanya kultur spesifik Sungkai Bunga Mayang. Sistem persenjataan lampung berupa badik, keris dan punduk. Model mata pencaharian yang pertanian masih tercermin kuat sampai saat ini. Sistem kekerabatan adat Pepadun, surat Lampung, arsitektur lama dan lain-lain semakin memperkuat riwayat tersebut.

Kini dengan semakin menguatnya otonomi daerah dan mencermati pemekaran daerah-daerah otonom yang cenderung mengikuti wilayah kultur dan marga maka berkembang pula minat sebagian warga sungkai untuk mendalaminya, terutama dimaksudkan teruntuk mempercepat perkembangan dan kemajuan wilayah Sungkai yang selama ini terkesan dimarjinalkan. Minat tersebut semakin mengemuka dengan semakin ramainya idea pemekaran di beberapa wilayah lain diluar maupun di dalam Lampung Utara. Di luar Lampung Utara seperti Mesuji, Pesawaran dan Pesisir Barat. Di dalam Lampung Utara seperti Semendo Abung.

Delapan kecamatan wilayah Sungkai mengkoordinasikan 85 desa yang tersebar di Sungkai Utara 15 desa, Hulu Sungkai 10 Desa, Sungkai Tengah 8 desa, Sungkai Selatan 11 desa, Sungkai Jaya 8 desa, Sungkai Barat 10 desa, Bungamayang 11 desa dan Muara Sungkai 11 desa.<sup>31</sup>

Adapun batas-batas Sungkai Bunga Mayang<sup>32</sup>, Kecamatan Sungkai Utara, Sungkai Tengah dan Hulu Sungkai adalah kecamatan pemekaran

---

<sup>31</sup>Dokumen Usulan Pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (pada tanggal, 23 Januari 2017, kotabumi) Bab 1 hlm,1

<sup>32</sup>Ibid 4-9

terakhir dari kecamatan sebelumnya Negararatu atau Ketapang. Berdiri tahun 1970 dengan ibukota Negararatu, pada tahun 2016 jarak Negaratu dengan ibukota kabupaten (Kotabumi) adalah 32 km, Gedung Makripat adalah 45 km., Batu Nangkop adalah 27 km, Luas administrasi wilayah pemerintahan 3 kecamatan adalah 335.60 km<sup>2</sup>. Jumlah desa yang dibawahkan adalah 33 kampung definitif.

Jumlah penduduknya 150.419 jiwa (25.855 kk) dengan 72.401 laki-laki dan 73.118 perempuan. Penduduk ini pada umum nya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Tegasnya 14.030 petani, 335 pedagang, 745 karyawan swasta, 361 peternak, 736 PNS/TNI/POLRI, 86 pensiunan, dan 1.213 buruh tani/perkebunan.

Lahan prodiksinya berupa sawah teknis 44 Ha, irigasi setengah teknis 253 Ha, irigasi sederhana 7 Ha, tadah hujan 4 Ha, tegal/kebun 18.434 Ha, ladang/tanah huma 22.759 Ha.

Sarana sosial budaya yang dimiliki adalah sekolah dan sarana kesehatan. Sekolah berupa TK 15 unit, SDN/MIN 56 unit, SD/MI Swasta 5 unit, SLTPN/MTsN 11 unit, dan SMU/MAN 3 unit. Sarana kesehatan berupa Puskesmas 3 unit dan puskesmas pembantu (Pustu) 15 unit, Puskesmas rawat inap 1, Rawat inap swasta 2 unit.

Letak administrasi pemerintahan 3 kecamatan ini adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasab dengan Kecamatan Pakuonratu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Selatan, Sebelah

Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungamayang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negriagung.

Topografi Kecamatan Hulu Sungkai, Sungkai Utara dan Sungkai Tengah ini pada umumnya rata dan bergelombang, sebagian lagi 20% bergelombang dan berbukit-bukit. Adapun nama kampung yang terletak di Kecamatan Sungkai Utara<sup>33</sup> adalah :

No	Kec. Sungkai Utara	Kec. Hulu Sungkai	Kec. Sungkai Tengah
1.	Negara Ratu	Gedung Makripat	Batunangkop
2	Negeri Sakti	Gedung Negara	Pampangtangguk Jaya
3.	Padang Ratu	Gedung Raja	Negeri Galihrejo
4	Batu Raja	Tulung Buyut	Mekar Asri
5	Ciamis	Lubuk Rukam	Negara Bumi
6	Kota Negara	Bunglai Tengah	Melungun Ratu
7	Negara Batin	Tanjung Harapan	Ratu Jaya
8	Gedung Batin	Negeri Kemakmuran	Negeri Campang Jaya
9	Negeri Ratu	Beringin Jaya	
10	Bangun Jaya	Ibul Jaya	
11	Ogan Jaya		
12	Baru Raharja		
13	Hanakau Jaya		
14	Negara Batin II		
15	Kota Negara Ilir		

Sumber: Disducapil kabupaten Lampung Utara 7 juli 2015

---

<sup>33</sup>Disduk Capil kabupaten Lampung utara (diambil pada 7 juli 2015)

Berdasarkan analisis potensinya maka 3 (tiga) kecamatan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah, prasarana pendidikan SLTP belum merata, prasarana beririgrasi yang sangat kurang, prasarana telepon yang kurang dan prasarana air minum yang sangat kurang dan realisasi usulan pembangunan dari desa yang masih sangat rendah.

Kecamatan Sungkai Selatan, Sungkai Barat Dan Sungkai Jaya adalah Kecamatan pemekaran dari kecamatan sebelumnya Negararatu/Ketapang. Berdiri  $\pm$  Tahun 1970 dengan ibukota Ketapang. Jarak ketapang dengan ibukota kabupaten (kotabumi) adalah 18 km. Kecamatan Sunkai Jaya Cempaka  $\pm$  12 km, Kecamatan Sungkai Barat Sinar Harapan  $\pm$  25 km. Luas administrasi pemerintahannya Kecamatan Sungkai Selatan, Sungkai Barat dan Sungkai Jaya adalah 210.81 Km<sup>2</sup> Jumlah desa yang di bawahkan adalah 27 desa.

Jumlah penduduknya 122.160 jiwa ( 16.074 KK) dengan 60.145 Laki-laki dan 62.015 Perempuan. Penduduk ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Tegasnya 11.289 petani, 312 pedagang, 319 peternak, 618 PNS/TNI/POLRI dan 1.140 buruh. Lahan produksinya berupa sawah teknis 336 Ha, irigasi setengah teknis 35 Ha, irigasi sederhana 405 Ha, tegal/kebun 6.270 Ha, ladang/tanah huma 4.585 Ha.

Sarana sosial budaya yang dimiliki adalah sekolah dan sarana kesehatan. Sekolah berupa TK 15 unit, SDN/MIN 32 unit, SD/MI Swasta 5 unit, SLTPN /MTsN 5 unit, SLTP/MTsN (Swasta) 10 unit, dan SMU/MAN 9 unit. Sarana kesehatan berupa puskesmas 3 unit dan puskesmas pembantu (Pustu) 7 unit, pusesmas eawat inap 3 unit.

Letak administrasi pemerintahan ini adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotabumi Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bungamayang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abung Barat.

Topografi Kecamatan Sungkai Selatan, Sungkai Barat dan Sungkai Jaya ini pada umumnya rata dan bergelombang, sebagian lagi  $\pm 20\%$  bergelombang berbukit-bukit. Adapun nama kampung yang terletak di tiap kecamatan tersebut<sup>34</sup> adalah :

No.	Kec. Sungkai Selatan	Kec. Sungkai Jaya	Kec. Sungkai Barat
1	Ketapang	Cempaka (Raja)	Sinar Harapan
2	Kota Agung	Cempaka Barat	Tanjung Jaya
3	Sirna Galih	Cempaka Timur	Gunungmaknibai
4	Labuhanratu Pasar	Sri Agung	Gunung Raja
5	Banjar Ketapang	Negara Agung	Negeribatin Jaya
6	Gedung Ketapang	Sri Jaya	Kubuhitu
7	Karang Rejo	Suka Jaya	Negerisakti
8	Bumi Ratu	Lepang Tengah	Comok Sinar Jaya

<sup>34</sup> Disducapil Kabupaten Lampung Utara (diambil pada 7 juli 2015)

9	Sidodadi	Cahaya Makmur	Way Isom
10	Labuhanratu Kampung		Cahayamas
11	Gunung Labuhan		

Sumber: Disdicapil kabupaten Lampung Utara 7 juli 2015

Kecamatan Bunga Mayang adalah Kecamatan pemekaran dari kecamatan Sungkai Selatan. Kecamatan ini berdiri setelah berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dasar hukum berdirinya kecamatan Bungamayang adalah Perda Kabupaten Lampung Utara No. 20 tahun 2000 dengan ibukota Negaratulang Bawang. Jarak Negaratulang Bawang dengan ibukota kabupaten (Kotabumi) adalah 30 km, luas administrasi pemerintahannya adalah 125.76 Km<sup>2</sup>. Jumlah desa yang dibawahkan adalah 11 desa definitif.

Jumlah penduduknya 68.680 jiwa (13.292 KK) dengan 34.171 Laki-laki dan 34.509 wanita. Penduduk ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Tegasnya 5.936 petani, 39 pedagang, 32 peternak, 314 PNS/TNI/POLRI, 65 pensiunan PNS/TNI/POLRI dan 499 buruh.

Sarana sosial budaya yang dimiliki adalah Sekolah dan sarana Kesehatan. Sekolah berupa TK 8 unit, SDN/MIN 20 unit, SLTPN/MTsN 2 unit, SLTP/MTs (Swasta) 3 unit dan SMU/MA 2 unit. Sarana kesehatan berupa puskesmas 1 unit, dan puskesmas pembantu (Pustu) 5 unit.

Letak administrasi pemerintahan ini adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negri Besar, Sebelah Selatan



berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Selatan/Abung Tinggi, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sungkai, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Utara.

Topografi kecamatan Bungamayang ini pada umumnya rata dan berkategori dataran rendah. Adapun nama kampung yang terletak di kecamatan Bungamayang<sup>35</sup> adalah :

No	Desa
1	Negaratulang Bawang
2	Kotanapal
3	Tanah Abang
4	Sukadana Udik
5	Sukadana Ilir
6	Haduyang Ratu
7	Isorejo
8	Mulyorejo I
9	Mulyorejo II
10	Tulang Bawang Baru
11	Suka Maju

Sumber: Kecamatan Bungamayang 7 juli 2015

Kecamatan Muara Sungkai adalah Kecamatan Pemekaran dari kecamatan Sungkai Selatan. Kecamatan ini berdiri setelah berlakunya

---

<sup>35</sup>Kecamatan Bunga Mayang, (diambil pada 7 juli 2015)

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemeritahan daerah. Dasar hukum berdirinya kecamatan muara sungkai adalah Perda Kabupaten Lampung Utara No.20 tahun 2000 dengan ibukota Negeri Ujung Karang. Jarak Negeriujungkarang dengan ibukota kabupaten (Kotabumi) adalah 35km. Luas admiistrasi wilayah pemerintahannya adalah 118.68 km<sup>2</sup>. Jumlah desa yang dibawahkan adalah 11 desa definitif.

Jumlah penduduknya 37.878 jiwa (5.231 KK) dengan 18.407 Laki-laki dan 19.471 perempuan, penduduk ini pada umumnya bermata pencaharian petani dan buruh tani. Tegasnya 1.304 petani, 153 nelayan, 125 pedagang, 67 pengusaha sedang/besar 84 peternak, 82 PNS/TNI/POLRI, 25 pensiun PNS/TNI/POLRI, 531 buruh dan 385 lain-lain.

Lahan produksinya berupa irigas sederhana 175 Ha, tadah hujan 83 Ha, tegal/kebun 6.725 Ha, ladang/tanah huma 9.048 Ha.

Sarana sosial budaya yang dimiliki adalah sekolah dan sarana kesehatan. Sekolah berupa TK 3 unit, SDN/MIN 13 unit, SLTPN/MTSN unit, SMA/MA 1 unit. Sarana kesehatan berupa puskesmas 1 unit dan puskesmas pembantu (pustu) 3 unit.

Letak administrasi pemerintahan ini adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Negeribesar, Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Abung Timur, Sebelah Timur berbatasan

denga Kecamatan Tulang bawang udik, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bungamayang.

Topografi Kecamatan Muara Sungkai ini pada umumnya rata dan berkategori dataran rendah. Adapun nama kampung yang terletak di Kecamatan Muara Sungkai<sup>36</sup> adalah :

No	Desa
1	Negeri Ujungkarag
2	Bandar Agung
3	Karang Sari
4	Karang Rejo II
5	Karang Sakti
6	Karang Mulyo
7	Banjar Negeri
8	Banjar Ratu
9	Negeriratu
10	Pakuon Agung
11	Sumber Agung

Sumber: Kecamatan Muara Sungkai 7 juli 2015

---

<sup>36</sup>Kecamatan Muara Sungkai (diambil pada 7 juli 2015)

## 2. Geografi dan Demografi

### a. Geografi

Sehubungan dengan usulan pemekaran daerah melalui pembentukan daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang meliputi 8 (delapan) dari 23 kecamatan di wilayah kabupaten Lampung Utara, maka pada tahun 2016 yang lalu tim pengkajian pemekaran daerah kabupaten Lampung Utara bekerja sama dengan topografi Angkatan Darat kodam II Sriwijaya dalam rangka melakukan pemetaan, survey dan penentuan titik koordinat batas.

Survey dan pemetaan batas yang dilakukan tim fasilitasi dan TOPDAM II Sriwijaya, menghasilkan peta dasar yang disertai dengan titik koordinat batas (102 buah titik koordinat) untuk 8 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon daerah persiapan kabupaten Sungkai Bunga Mayang, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Waykanan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Waykanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Secara administrasi, Sungkai Bunga Mayang terbagi dalam 8 wilayah kecamatan yang terdiri dari 85 desa, dengan total luas wilayah 790,36 Km<sup>2</sup>, dari luas Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan administrasi pemerintahannya<sup>37</sup> , wilayah Sungkai

Bunga Mayang adalah sebagai berikut :

NO	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah
1	Sungkai Utara	Negararatu	15	130,88
2	Hulu Sungkai	Gedungmakripat	10	92,63
3	Sungkai Tengah	Batunangkop	8	11,160
4	Sungkai Selatan	Ketapang	11	89,65
5	Sungkai Jaya	Cempaka	9	52,20
6	Sungkai Barat	Sinar Harapan	10	68,96
7	Muara Sungkai	Negeriujungkarang	11	118,68
8	Bungamayang	Negaratulbang	11	125,76
	<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>790.36</b>

Sumber : Disducapil Kabupaten Lampung Utara, Agustus 2016

Dari segi Hidrologi, Sungkai Bunga Mayang Memiliki Potensi yang besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan bagi sektor pertanian. Di sisi lain potensi air permukaan dari sungai-sungai yang ada juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi maupun budidaya perikanan darat untuk mendukung produktifitas sektor pertanian. Potensi ini juga dapat

---

<sup>37</sup> Disducapil Kabupaten Lampung Utara,(diambil Agustus 2016)

dikembangkan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang selama ini belum dikelola secara optimal. Sungkai Bunga Mayang Memiliki beberapa sungai dengan DAS yang cukup panjang<sup>38</sup> sebagai berikut :

No	Nama Sungai	Panjang	Daerah Alir (Km)
1	Way Talang Mas	57	134
2	Way Melungun	45	133
3	Way Sungkai Hulu	38	116
4	Way Buluh	25	64
5	Way Buyut	33	124
6	Way Papan	33	208

Sumber : Balai PSDA Wilayah mesuji Tulang Bawang, Lampung Utara dalam angka 2014

Iklim Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang termasuk dalam daerah beriklim tropis dengan hujan dan musim kemarau bergantian sepanjang tahun dengan memiliki temperatur rata-rata 30<sup>0</sup>C dengan jumlah hujan rata-rata 12 hari/bulan.<sup>39</sup>

Sungkai bunga mayang memiliki hutan lindung maupun hutan produksi. Luas hutan lindung di Tanjung Raja 15.390 sedangkan hutan produksi seluas 10.005 Hektar yang keseluruhannya berada di kecamatan Sungkai Utara, Selain kehutanan, lahan perkebunan di Sungkai Bunga

<sup>38</sup> Balai PSDA Wilayah mesuji Tulang Bawang, Lampung Utara dalam angka 2014

<sup>39</sup> Dokumen kajian pembentukan Daerah persiapan Kabupaten sungkai bunga mayang (dikaji 2016) hal 4-2

Mayang juga cukup luas, meliputi perkebunan karet, kelapa hibrida, kelapa swit, tebu, cengkeh, kopi, lada, kelapa dalam dan kayu manis.<sup>40</sup>

b. Demografi

Jumlah penduduk Sungkai Bunga Mayang hingga Desember 2016 berjumlah 225.489 jiwa, dari total penduduk Kabupaten Lampung Utara, adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 79.134 jiwa, sedangkan perempuan 75.740 jiwa. Dengan luas wilayah 790.36 Km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk Sungkai Bunga Mayang mencapai 791.85 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>41</sup> Adapun Jumlah penduduk menurut kecamatan di Sungkai Bunga Mayang terlihat pada tabel tersebut :

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungkai Utara	16.559	17.446	48.803
2	Hulu Sungkai	7.170	7.006	20.712
3	Sungkai Tengah	8.011	8.058	23.344
4	Sungkai Selatan	10.940	10.608	31.866
5	Sungkai Jaya	6.207	6.248	17.908
6	Sungkai Barat	4.992	5.022	14.761
7	Muara Sungkai	7.120	7.003	21.398
8	Bungamayang	18.205	16.349	46.697
	<b>Jumlah total</b>	<b>79.134</b>	<b>75.740</b>	<b>225.489</b>

Sumber : Dokumen Usulan Pembentukan Sungkai Bunga Mayang

<sup>40</sup>Ibid hal 4-3

<sup>41</sup>Wawancara Pribadi, Ketua Panitia Sungkai Bunga Mayang, Hi. Hidayat Lembasi, SE (Pada tanggal 27 April 2018)



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak yaitu kecamatan Sungkai Utara dengan jumlah penduduk 48.803 jiwa yang tersebar di 15 desa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Sungkai Barat dengan 14.761 jiwa yang tersebar di 10 desa. Adapun kepadatan penduduk per KM<sup>2</sup> dan Rata penduduk per-RT.

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Penduduk	Kepadatan per-KM	Rerata Penduduk Per-RT
1	Sungkai Utara	12.650	48.803	287.44	2.89
2	Hulu Sungkai	9.172	20.712	194.31	1.96
3	Sungkai	6.782	23.344	189.94	2.79
4	Tengah	7.653	31.866	264.84	3.28
5	Sungkai	3.449	17.908	223.89	3.58
6	Selatan	4.972	14.761	217.98	2.86
7	Sungkai Jaya	5.321	21.398	138.20	3.13
8	Sungkai Barat	13.202	46.697	290.65	2.76
	Muara Sungkai	<b>59.577</b>	<b>225.489</b>	<b>791.85</b>	<b>3.00</b>
	Bunga Mayang				
	<b>Total</b>				

Sumber : Dokumen Usulan pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang

### 3. Pemerintahan

Setelah lima tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1950 kepemimpinan Marga Sungkai Bunga Mayang dijabat oleh Pesirah dan pemerintahan Republik Indonesia dijabat oleh Camat. Pada tahun 1957 berakhirnya sistem kepemimpinan Teritorial Geneologis (Pesirah) Marga Sungkai Bunga Mayang berubah menjadi pemerintahan negeri, yakni negeri sungkai yang dipimpin oleh kepala negeri.

Kepala negeri yang pertama adalah Ahmad Djazuli Ratu Anom Sekandar Alam (1960-1961) Buay Indor Gajah dari Negara Tulang Bawang, setelah menang dalam pemilu raya pada tahun 1959 mengalahkan 3 calon lainnya yaitu Calon Kepa Negeri.

- 1) Ahmad Jazuli Gelar Ratu Anom Sekandar Alam (Negara Tulang Bawang)
- 2) Hifni Gelar Ratu Kepa Miga (Sukadana Ilir)
- 3) Nawawi Gelar Tuan Raja (Negara Batin)
- 4) Juhri (Cempaka)

Pada tahun 1962 karena kepala negeri Sungkai meninggal dunia, maka diadakan pemilihan kembali kepala negeri yang dipilih oleh anggota Dewan Negeri, dalam pemilihan tersebut terpilih Muchtar Hasan dan resmi ditetapkan Kepa Negeri Sungkai yang kedua, Muchtar Hasan yang berasal Buay Liwa dari Baturaja merupakan pemimpin Marga Sungkai Bunga Mayang terakhir (1962-1973) yang dipilih oleh Dewan Negeri. Pada tahun 1973 kepemimpinan adat dihapus oleh Pemerintah Republik

Indonesia dengan demikian berakhirlah kepemimpinan adat secara formal dan selanjutnya kepemimpinan adat hanya ada ditingkat kampung dan punyimbang buay masing-masing.<sup>42</sup>

Sejak tahun 1960 selain ada Kepala Negeri sudah di bentuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungkai Selatan berkedudukan di Ketapang dan Kecamatan Sungkai Utara berkedudukan di Negararatu dan pada tahun 2000 kecamatan Sungkai Selatan dimekarkan kembali menjadi Kecamatan Bunga Mayang dan Kecamatan Muara Sungkai. Pada tahun 2008 kecamatan Sungkai Selatan kembali dimekarkan menjadi Kecamatan Sungkai Jaya dan Kecamatan Sungkai Barat, sedangkan Kecamatan Sungkai Utara dimekarkan menjadi Kecamatan Hulu Sungkai dan Sungkai Tengah. Dengan demikian wilayah adat Marga Sungkai Bunga Mayang saat ini terdiri dari 8 kecamatan.<sup>43</sup>

Kalau melihat dari perjalanan sejarah Sungkai Marga Bunga Mayang mulai dari Skala Berak sampai bermukim di wilayah Sungkai, jelas Marga ini merupakan bagian dari suku-suku yang ada di Nusantara bergerak dari arah Sumatra Utara berpencar kearah Aceh, Sumatera bagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi dan berbagai daerah Nusantara lainnya bahkan Malaysia, Thailan dan Filipina yang dalam perjalanan sejarahnya dipengaruhi ajaran Islam, hingga terbentuklah adat budaya lokal yang arif

---

<sup>42</sup>Tjik Aman Gelar Suntan Raja Besar, Tokoh Adat Sungkai Utara, Tiyuh Negararatu Tengah, wawancara pribadi (pada 15 mei 2018)

<sup>43</sup>Hi. Hidayat Lembasi, Ketua Tim Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, wawancara pribadi (27 April 2018)

terlembagakan dalam kehidupan sehari-hari dibawah pengaruh kepemimpinan adat dan kepemimpinan Islam.

Saat ini Pemerintahan Sungkai Bunga Mayang dipimpin oleh kepala desa dalam tingkat desa/tiyuh, sedangkan didalam adatnya Sungkai Bunga Mayang di Pimpin oleh Paksi tiap tiyuh, dalam kecamatan Sungkai Bunga Mayang pemerintahannya di pimpin oleh Camat, disetiap kecamatan Sungkai terdapat pemimpinya/camat.

#### 4. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Salah satu tanggung jawab pemerintah yang sangat penting dalam peroses pembangunan sosial adalah pendidikan. Adapun gambaran pendidikan dalam bentuk tabel di Sungkai Bunga Mayang disetiap kecamatannya.

**Tabel ,** Jumlah Sekolah Dasar, Gedung dan Ruang Kelas

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		
		Sekolah	Gedung	Ruang Kelas
1	Sungkai Utara	28	60	162
2	Hulu Sungkai	12	56	62
3	Sungkai Tengah	10	45	59
4	Sungkai Selatan	13	50	130
5	Sungkai Jaya	7	30	43
6	Sungkai Barat	12	27	69
7	Muara Sungkai	12	39	75
8	Bungamayang	18	60	119
Jumlah		112	367	719

Sumber: Dokumen pembentukan usulan Kabupaten Sungkai Bungamayang

**Tabel ,Jumlah Guru Umum, Agama, dan Orkes Sekolah Dasar Negeri.**

No	Kecamatan	Aparatur				
		Kep Sek	Umum	Agama	Orkes	Penjaga
1	Sungkai Utara	50	134	25	14	25
2	Sungkai Selatan	33	169	15	9	13
3	Muara Sungkai	12	37	8	4	4
4	Bungamayang	18	72	21	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>113</b>	<b>412</b>	<b>69</b>	<b>31</b>	<b>50</b>

**Tabel , Jumlah Murid dan Jenis Kelamin Sekolah Dasar Negeri**

No	Kecamatan	Murid		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Sungkai Utara	720	735	1.455
2	Hulu Sungkai	150	230	380
3	Sungkai Tengah	165	193	358
4	Sungkai Selatan	665	658	1.323
5	Sungkai Jaya	155	172	327
6	Sungkai Barat	147	112	259
7	Muara Sungkai	228	228	456
8	Bungamayang	873	870	1.743
<b>Jumlah</b>		<b>3.103</b>	<b>3.198</b>	<b>6.301</b>

**Tabel, Jumlah Sekolah Menengah Pertama Menurut Status.**

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Sek	Ged	Rukel	Sek	Ged	Rukel
1	Sungkai Utara	5	15	56	2	1	7
2	Hulu Sungkai	3	9	27			
3	Sungkai Tengah	2	4	8	1	2	3
4	Sungkai Selatan	3	20	60	2	3	6
5	Sungkai Jaya	1	7	13			
6	Sungkai Barat	2	5	10	1	4	8
7	Muara Sungkai	1	3	9	3	3	9
8	Bungamayang	3	10	31	1	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>73</b>	<b>214</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>41</b>

**Tabel, Jumlah Pelajar SMP Menurut status dan jenis kelamin**

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sungkai Utara	787	778	1565	120	122	242
2	Hulu Sungkai	400	418	816	-	-	-
3	Sungkai Tengah	115	135	250	40	38	78
4	Sungkai Selatan	488	488	976	73	74	147
5	Sungkai Jaya	195	205	400	-	-	-
6	Sungkai Barat	196	190	386	461	461	922
7	Muara Sungkai	54	54	108	161	161	322
8	Bungamayang	520	527	1047	68	69	137
<b>Jumlah</b>		<b>2.755</b>	<b>2.795</b>	<b>5.548</b>	<b>923</b>	<b>925</b>	<b>1.848</b>

**Tabel, Jumlah Guru SMP menurut status dan jenis kelamin**

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	Sungkai Utara	70	61	131	7	9	16
2	Hulu Sungkai	29	30	59	-	-	-
3	Sungkai Tengah	18	19	37	-	-	-
4	Sungkai Selatan	47	48	95	20	23	43
5	Sungkai Jaya	10	15	25	-	-	-
6	Sungkai Barat	19	25	44	7	7	16
7	Muara Sungkai	7	6	13	12	9	21
8	Bungamayang	40	45	85	7	6	13
<b>Jumlah</b>		<b>240</b>	<b>249</b>	<b>489</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	<b>108</b>

**Tabel, Jumlah SMP Menurut status dan sekolah**

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Sek	Ged	Rukel	Sek	Ged	Rukel
1	Sungkai Utara	5	1	56	-	-	-
2	Hulu Sungkai	3	-	27	-	-	-
3	Sungkai Tengah	2	-	8	-	-	-
4	Sungkai Selatan	3	1	14	1	1	3
5	Sungkai Jaya	1	-	13	-	-	-
6	Sungkai Barat	2	-	16	-	-	-
7	Muara Sungkai	1	-	9	-	-	-
8	Bungamayang	3	-	31	1	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>2</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>



**Tabel, Jumlah Pelajar SMU Menurut status dan jenis kelamin**

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jum	Pria	Wanita	Jum
1	Sungkai Utara	272	291	563	-	-	-
2	Hulu Sungkai	-	-	-	-	-	-
3	Sungkai Tengah	-	-	-	-	-	-
4	Sungkai Selatan	205	199	404	42	54	96
5	Sungkai Jaya	-	-	-	-	-	-
6	Sungkai Barat	-	-	-	-	-	-
7	Muara Sungkai	-	-	-	-	-	-
8	Bungamayang	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>477</b>	<b>490</b>	<b>967</b>	<b>42</b>	<b>54</b>	<b>96</b>

**Tabel, Jumlah Guru SMU Menurut status dan jenis kelamin**

No	Kecamatan	Negeri			Swasta		
		Pria	Wanita	Jum	Pria	Wanita	Jum
1	Sungkai Utara	25	15	40	-	-	-
2	Hulu Sungkai	-	-	-	-	-	-
3	Sungkai Tengah	-	-	-	-	-	-
4	Sungkai Selatan	30	20	50	3	5	8
5	Sungkai Jaya	-	-	-	-	-	-
6	Sungkai Barat	-	-	-	-	-	-
7	Muara Sungkai	-	-	-	-	-	-
8	Bungamayang	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>35</b>	<b>90</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

Dalam sosial pemerintah harus mampu menciptakan kerukunan agama, ras, dan suku. Sungkai Bunga Mayang memiliki beragam Agama yang dianut oleh masyarakatnya. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Sungkai Bunga Mayang, sebagai berikut :

**Table, Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut**

No	Kecamatan	Pemeluk Agama					
		Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Jumlah
1	Sungkai Utara	32.210	598	179	16	1.181	48.803
2	Hulu Sungkai	14.176	-	-	-	-	20.712
3	Sungkai Tengah	16.069	-	-	-	-	23.344
4	Sungkai Selatan	20.967	171	41	13	356	31.866
5	Sungkai Jaya	12.455	-	-	-	-	17.908
6	Sungkai Barat	9.944	-	-	-	-	14.761
7	Muara Sungkai	13.754	73	179	1	116	21.398
8	Bungamayang	31.104	613	643	19	175	46.697
<b>Jumlah</b>		<b>150.679</b>	<b>1.455</b>	<b>1.042</b>	<b>49</b>	<b>1.828</b>	<b>225.489</b>

Sumber: Dokumen Usulan pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang

**Tabel, Jumlah bangunan fisik Agama**

No	Kecamatan	Bangunan Fisik					
		Masjid	Surau	Gereja	Vihara	Pure	Jumlah
1	Sungkai Utara	117	12	5	12	-	146
2	Sungkai Selatan	82	1	1	2	-	86
3	MuaraSungkai	21	-	-	-	-	21
4	Bungamayang	38	-	4	-	-	42
Jumlah		258	13	10	14	-	295

Kesehatan masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan secara fisik. Salah satu indikatornya adalah angka harapan hidup penduduk Sungkai Bungamayang terus meningkat. Peningkatan pelayanan kesehatan berkaitan erat dengan tersedianya sarana dan petugas kesehatan yang memadai. Adapun jenis pelayanan kesehatan menurut jenis disetiap Kecamatan yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel Jumlah Puskesmas Menurut Jenisnya.**

No	Kecamatan	Jenis Puskesmas				Jumlah
		Perawatan	Induk	Pustu	BP Orkes	
1	Sungkai Utara	1	2	6	2	11
2	Sungkai Selatan	1	2	1	-	4
3	MuaraSungkai		1	2	-	3
4	Bungamayang	1	1	4	-	6
5	Sungkai Jaya	1				1
Jumlah		1	6	13	2	28

**Tabel, Jumlah Klinik KB, PUS dan Metoda Kontrasepsi**

No	Kecamatan	Klinik KB	PUS	Kontrasepsi		
				PIL	IUD	MOP
1	Sungkai Utara	8	10.708	1.662	772	143
2	Sungkai Selatan	3	7.944	1.789	349	10
3	MuaraSungkai	2	2.967	771	84	3
4	Bungamayang	5	5.967	1.367	363	21
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>27.586</b>	<b>10.189</b>	<b>7.172</b>	<b>177</b>

**Tabel, (Lanjutan) Jumlah Klinik KB, PUS dan Metoda Kontrasepsi**

No	Kecamatan	Kontrasepsi				Jumlah
		STK	IMP	KDM	MOW	
1	Sungkai Utara	2.796	1.669	14	76	7.132
2	Sungkai Selatan	1.985	949	9	23	5.114
3	MuaraSungkai	517	537	3	3	1.898
4	Bungamayang	932	1.194	-	58	3.935
<b>Jumlah</b>		<b>6.320</b>	<b>4.349</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>18.079</b>

Ekonomi Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, pada umumnya adalah bercocok tanam, berternak, berdagang/wirusaha, dan lain sebagainya. Adapun struktur ekonomi masyarakat Sungkai Bunga Mayang<sup>44</sup> yang akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Dokumen Usulan Pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang 2017

**Tabel, jumlah Keluarga Tani dan Luas Tanah Menurut Jenis**

No	Kecamatan	Keluarga	Jenis Lahan (Ha)		
			Sawah	Kering	Jumlah
1	Sungkai Utara	12.121	300	32.882	33.182
2	Sungkai Selatan	-	147	19.211	19.558
3	MuaraSungkai	-	773	11.096	11.869
4	Bungamayang	-	279	12.297	12.576
<b>Jumlah</b>		<b>12.121</b>	<b>1.499</b>	<b>75.486</b>	<b>77.185</b>

**Tabel, Jumlah Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo**

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	Sungkai Utara	456	1.824	1.200	3.216
2	Sungkai Selatan	2.218	9.205	2.418	6.432
3	MuaraSungkai	40	163	-	-
4	Bungamayang	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2.714</b>	<b>11.192</b>	<b>3.618</b>	<b>9.648</b>

**Tabel, Jumlah Luas Panen dan Produksi Jagung dan Ubikayu**

No	Kecamatan	Jagung		Ubikayu	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	Sungkai Utara	2.490	8.640	3.845	43.641
2	Sungkai Selatan	3.054	10.750	5.815	66.428
3	MuaraSungkai	315	1.090	-	-
4	Bungamayang	565	1.992	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6.424</b>	<b>22.472</b>	<b>9.660</b>	<b>110.069</b>

**Tabel, Jumlah Luas Panen dan Produksi Ubijalar dan Kedelai**

No	Kecamatan	Ubijalar		Kedelai	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	Sungkai Utara	-	-	-	-
2	Sungkai Selatan	8	79	6	6
3	MuaraSungkai	2	20	2	2
4	Bungamayang	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>99</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

**Tabel, Jumlah Luas Panen dan Produksi Kacang Hijau dan Kacang Tanah**

No	Kecamatan	Kacang Hijau		Kacang Tanah	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi
1	Sungkai Utara	26	26	42	48
2	Sungkai Selatan	58	64	182	232
3	MuaraSungkai	3	3	2	3
4	Bungamayang	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>87</b>	<b>93</b>	<b>226</b>	<b>283</b>

**Tabel, Jumlah Luas Areal Perkebunan Rayat Menurut Jenis Tanaman**

No	Kecamatan	Luas Area (Ha)				
		Karet	Kopi	Lada	K. Dalam	K. Hib
1	Sungkai Utara	3.700	1.010	2.835	-	-
2	Sungkai Selatan	877	342	4.376	27	-
3	MuaraSungkai	834	103	-	90	93
4	Bungamayang	396	99	23	182	25
<b>Jumlah</b>		<b>5.907</b>	<b>1.554</b>	<b>7.234</b>	<b>299</b>	<b>118</b>

**Tabel, Jumlah Produksi Perkebunan Rayat Menurut Jenis Tanaman**

No	Kecamatan	Produk (Ton)				
		Karet	Kopi	Lada	K. Dalam	K. Hib
1	Sungkai Utara	1.600	-	-	-	-
2	Sungkai Selatan	810	135	1.457	9	-
3	MuaraSungkai	260	8	-	56	21
4	Bungamayang	168	10	1	219	145
<b>Jumlah</b>		<b>2.838</b>	<b>153</b>	<b>1.458</b>	<b>284</b>	<b>166</b>

**Tabel, Produksi DAN Sebaran Ternak Unggas**

No	Kecamatan	Ayam Ras	Ayam Buras	Bebek	Jumlah
1	Sungkai Utara	17.000	45.000	6.900	68.900
2	Sungkai Selatan	1.547	34.078	142	35.767
3	MuaraSungkai	8.000	27.500	1.050	36.550
4	Bungamayang	-	25.815	2.175	27.990
<b>Jumlah</b>		<b>26.547</b>	<b>132.395</b>	<b>10.267</b>	<b>169.207</b>

**Tabel, Jumlah Ternak yang Dipotong Tahun 2016**

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
1	Sungkai Utara	38	15	785	124	45.423
2	Hulu Sungkai	25	9	345	-	20.889
3	Sungkai Tengah	15	6	256	-	22.897
4	Sungkai Selatan	76	25	1.229	44	36.838
5	Sungkai Jaya	23	4	378	-	33.543
6	Sungkai Barat	20	6	543	-	30.372
7	Muara Sungkai	30	12	1.180	-	34.329
8	Bungamayang	15	6	651	-	47.594
<b>Jumlah</b>		<b>204</b>	<b>83</b>	<b>3.845</b>	<b>168</b>	<b>398.289</b>



**Tabel, Produksi Telur dan Daging Tahun 2016**

No	Kecamatan	Telur (Kg)	Daging (Kg)					
			Sapi	Kerbau	Kamb	Babi	Domba	Ung gas
1	Sungkai Utara	145.725	5.250	-	6.450	6.450	14.393	-
2	Sungkai Selatan	90.023	17.400	-	12.290	2.200	32.264	-
3	MuaraSungka i	76.387	4.500	1.920	11.800	-	29.800	-
4	Bungamayang	76.465	2.250	-	6.510	-	17.161	-
<b>Jumlah</b>		<b>388.600</b>	<b>29.400</b>	<b>1.920</b>	<b>38.450</b>	<b>8.650</b>	<b>93.618</b>	<b>-</b>

**Tabel , Jumlah Nelayan / Petani Ikan**

No	Kecamatan	Nelayan Sungai Rawa	Petani Ikan/Kolam	Tambak	Jumlah
1	Sungkai Utara	48	70	-	118
2	Sungkai Selatan	50	75	-	125
3	MuaraSungkai	30	10	-	40
4	Bungamayang	48	7	-	55
<b>Jumlah</b>		<b>176</b>	<b>162</b>	<b>-</b>	<b>338</b>

**Tabel, Jumlah Pasar dan Pertokoan**

No	Kecamatan	Toko			Pasar		
		Permanen	Semi	Darurat	Permanen	Semi	Darurat
1	Sungkai Utara	-	-	228	-	-	8
2	Sungkai Selatan	-	80	154	-	2	4
3	MuaraSungkai	-	-	40	-	-	1
4	Bungamayang	-	44	180	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>124</b>	<b>602</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

**Tabel, Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016**

No	Kecamatan	Target Rp. (000)	Realisasi Rp. (000)	Over	Persentase (%)
1	Sungkai Utara	44.855	44.554	(301)	99.33
2	Sungkai Selatan	36.733	37.030	297	100.81
3	MuaraSungkai	40.617	36.901	(3.716)	90.85
4	Bungamayang	56.610	57.011	401	100.71
<b>Jumlah</b>		<b>178.815</b>	<b>175.486</b>	<b>(3.319)</b>	<b>97.92</b>

Adat istiadat dalam masyarakat Sungkai Bunga Mayang, mengenal adanya kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut *keluarga batih*. Keluarga ini terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum berkeluarga. Mereka tinggal dalam satu rumah yang disebut *Manyamak*.<sup>45</sup>

Manyamak ini merupakan urusan keluarga yang terikat dalam satu tugas yang berorientasi pada dapur kehidupan keluarga. Tugas ayah adalah mengurus dan memelihara anggota manyamak dengan dibantu oleh ibu dan anak-anak yang telah dewasa. Sistem inilah yang menjadi dasar kekerabatan dan kemasyarakatan Sungkai Marga Bunga Mayang.

Setelah keluarga batih ini berkembang maka timbul istilah *Radiksekalik*, yang mengandung makna “ yang dekat dan terikat “. Jadi, kalau dilihat dari silsilah keturunan dengan berdasarkan pada keluarga batih maka sesungguhnya seluruh masyarakat Lampung itu dulunya itu berasal dari satu keturunan.

---

<sup>45</sup>Tajudin, Br, Gelar Raja Nyinang, Tokoh Adat, Tiyuh Negarartu Unggak, Wawancara pribadi (Pada 14 Mei 2018)

Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, mayoritas bersuku Lampung, namun tetap rukun bersama dengan suku-suku lainnya, seperti Jawa, Sunda, Ogan, Bali dan lain sebagainya. Dalam tradisi adat Lampung khususnya Sungkai, itu mengambil garis keturunan dari bapak, sehingga setiap anak laki-laki tertua dari keturunan tertua akan bertindak sebagai pemimpin dan bertanggung jawab untuk mengatur anggota kerabat lainnya.<sup>46</sup>

Masyarakat Sungkai Bunga Mayang juga mengenal sistem stratifikasi sosial yang dapat dibedakan atas prinsip: Umur, keaslian, dan kepunyaimbangan. Hal ini jelas terlihat dalam pelaksanaan upacara adat, penerapan umur sebagai acuan. Kelompok orang tua bertindak selaku perencana, pengatur, penimbang, dan penentu keputusan. Kemudian, disusul dengan kelompok yang lebih muda yang terdiri dari kepala keluarga yang berperan sebagai pendamping atau pembantu kelompok orang-orang tua. Pada level selanjutnya, disusul dengan para pemuda yang belum berkeluarga sebagai tenaga kerja, ketika memulai maupun mengakhiri perhelatan adat.<sup>47</sup>

Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, memiliki pandangan hidup yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan istilah Pi'il Pesenggiri yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pi'il Pesenggiri yang menyangkut harga diri. Orang Lampung khususnya masyarakat Sungkai Bunga Mayang mempunyai sikap hidup untuk selalu

---

<sup>46</sup>Zainudin, Gelar Raja Lama, Tokoh adat, Tiyuh Negararatu Liba, wawancara pribadi (pada tanggal 14 Mei 2018)

<sup>47</sup>Hi. Tjik Aman, Gelar Sunan Raja Besar, Tokoh adat, Tiyuh Negararatu Tengah, Wawancara pribadi (pada tanggal 15 Mei 2018)

bersikap bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri serta tau tanggung jawab dan kewajibannya.

- 2) Sakai Sambaian. Keharusan bagi setiap orang lampung untuk hidup bergotong royong, berjiwa sosial dan tanpa pamrih menolong orang lain.
- 3) Nemui Nyimah. Keharusan bagi orang lampung untuk bersikap lebih sopan santun terhadap sesama anggota masyarakat, terbuka bagi siapa saja baik moral maupun material.
- 4) Nengah Nyampur. Keharusan bagi setiap orang lampung untuk selalu bergaul dalam masyarakat luas untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran, pendapat, serta inisiatif demi kehidupan bersama.
- 5) Bejuluk Beadek. Orang lampung harus mempunyai gelar dan berjuang guna menyempurnakan hidupnya dan juga bersahabat dengan siapa saja serta tata kerama yang baik sesuai dengan julukan yang diberikan kepadanya.<sup>48</sup>

Sistem perkawinan dalam masyarakat Lampung Khususnya masyarakat Sungkai Marga Bunga Mayang berlaku perkawinan sistem Eksogami. Adapun dalam upacara perkawinan dikenal adanya “Uang Jujur” yang berfungsi sebagai tukon di Jawa. Setelah perkawinan istri menjadi klen suami.

Bagi masyarakat Sungkai Bunga Mayang tidak mengenal istilah perceraian tetapi mengenal istilah “Perkawinan Nyemalang” yaitu apabila suami meninggal dunia, istri boleh menikah dengan pihak suaminya yang sudah meninggal dunia tersebut. Sebaliknya jika istri meninggal dunia, suami boleh

---

<sup>48</sup>Tajudin.Br, Gelar Raja Nyinang, Tokoh adat Tiyuh Negararatu Unggak, wawancara pribadi ( pada tanggal 14 Mei 2018 )

menikah dengan saudara perempuan almarhuma istrinya, yang dikenal dengan istilah “Kawin Nuket”.

Adalagi istilah “Sebambangan” atau “Kawin Lari”, yaitu jika seorang bujang melarikan gadis yang dicintainya untuk dijadikan istrinya. Hal ini bisa terjadi karna ada suatu hal yang menghalanginya, misalnya orang tua sigadis tidak merestui hubungan mereka sehingga terpaksa si bujang dan gadis tersebut bersepakat untuk kawin dalam pelariannya.<sup>49</sup>

Adat istiadat masyarakat Sungkai Bunga Mayang amatlah masih kental baik itu suku Lampung, jawa, sunda, oagan, dan lain sebagainya, terlihat dalam setiap upacara adat yang dilaksanakan oleh setiap suku, masyarakat adat Sungkai Bunga Mayang pun amat toleran dalam bersuku nampak ketika ada acara adat yang dilaksanakan oleh suatu suku, semua masyarakat ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut.

##### 5. Transportasi dan komunikasi

Tingkat kesejahteraan kerap sekali dikaitkan dengan kepemilikan kendaraan atau transportasi terutama mobil. Adapun jumlah kepemilikan transportasi di setiap Kecamatan yang tergambar dalam tabel sebagai berikut :

No	Kecamatan	Bus mini	Truk	Mikr olet	Mobil Pribadi	Mobil Dinas	Sepeda Motor
1	Bungamayang	1	245	4	186	2	4464
2	Muara Sungkai	3	72	3	73	2	1813
3	Sungkai Utara	4	86	19	155	3	7603

---

<sup>49</sup>Zainudin, Gelar Raja Lama, Tokoh Adat, Tiyuh Negararatu Liba, wawancara pribadi (pada tanggal 14 mei 2018)

4	Hulu Sungkai	-	36	33	72	3	2635
5	Sungkai Tengah	-	18	14	26	1	2286
6	Sungkai Jaya	-	23	8	35	1	2172
7	Sungkai Selatan	4	35	5	135	3	5672
8	Sungkai Barat	1	48	7	98	1	2432
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>563</b>	<b>93</b>	<b>780</b>	<b>14</b>	<b>29.217</b>

Sumber: Dokumen Tim Kajian Usulan Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang 2017

Sedangkan alat komunikasi yang digunakan di Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bung Mayang itu tidak terhitung banyaknya baik itu mulai dari telepon genggam ataupun telepon rumah. Karna hampir disetiap elmen masyarakat baik itu dari tingkat kelas bawah sampai atas rata-rata sudah memiliki telepon genggam atau (Hp).

#### B. Upaya Pemekaran Wilayah dan Perkembangannya

Wacana pemekaran daerah Kabupaten Sungkai Bunga Mayang itu sudah sejak 14 tahun lalu atau pada tahun 2004, upaya formal pemekaran Daerah kembali diusulkan, dimana sejumlah tokoh masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat 8 kecamatan yaitu : Kecamatan Sungkai Utara, Sungkai Selatan, Muara Sungkai, Sungkai Barat, Sungkai Tengah, Sungkai Jaya, Hulu Sungkai dan Bunga Mayang. Secara kolektif sepakat untuk membentuk Daerah Otonomi Baru melalui pembentukan daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Agus Sulistio, Gelar Suntan Puncak Negara, Tokoh Masyarakat Sungkai, Wawancara pribadi (Pada 10 mei 2018)

Para tokoh Sungkai Bunga Mayang Membentuk kepanitian yang bertugas menghimpun aspirasi masyarakat dan menyampaikan aspirasi tersebut secara resmi kepada pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara ( Selaku kabupaten induk ) dan DPRD kabupaten Lampung Utara.<sup>51</sup>

Upaya yang dilakukan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim khusus Pemekaran Sungkai Bunga Mayang ini tidak lain guna mempercepat tindak lanjut dari keinginan bersama ini, supaya bisa disampaikan kepada pemerintah daerah khususnya Bupati agar mempertimbangkan yg menjadi keinginan seluruh masyarakat sungkai, guna mempercepat pembangunan.<sup>52</sup>

Adapun upaya pemekaran wilayah yang dilakukan oleh Tim khusus Sungkai Bunga Mayang, yang di bentuk bersama- sama oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat Sesungkai Marga Bunga Mayang, dimana sebelum Tim Persiapan Sungkai Bunga Mayang, mengusulkan keinginan untuk membentuk kabupaten baru kepada pemerintah daerah, terlebih dahulu Tim khusus meminta aspirasi masyarakat Sesungkai Marga Bunga Mayang sesuai intruksi dari tokoh masyarakat, dan tokoh adat.<sup>53</sup>

Peroses mengambil aspirasi masyarakat Sungkai Bunga Mayang cukup memakan waktu yang lama, dimana Tim Sungkai Bunga Mayang, bekerja sama dengan Tokoh masyarakat, dan Tokoh adat, disetiap kecamatan, dan

---

<sup>51</sup>Abdul Hamid, Gelar Mega Suntan, Tokoh Masyarkat Sungkai, wawancara pribadi (Pada tanggal 10 mei 2018)

<sup>52</sup>Welli Defri, Gelar Suntan Guru Marga, Tokoh Masyarakat Sungkai, Wawancara pribadi (Pada tanggal 11 mei 2018)

<sup>53</sup>Erwinto, S.Ag, M.Kom.i., Sekertaris Tim 9 Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Wawancara pribadi (Pada tanggal 26 april 2018)



membagikan selemba kertas kepada masyarakat, yang berisi meminta persetujuan setiap masyarakat Sungkai guna usulan pembentukan kabupaten Sungkai Bunga mayang.<sup>54</sup>

Tokoh masyarakat bersama dengan tokoh adat mengusulkan musyawarah kepada Tim Sungkai Bunga Mayang, di setiap kecamatan bersama dengan BPD guna menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut<sup>55</sup>, sesuai prosedur pemekaran dalam perluasan wilayah.

Gagasan usulan pembentukan kabupaten Sungkai Bunga Mayang di Deklarasikan oleh Masyarakat Sungkai Bunga Mayang pada 2007 namun belum terlihat adanya perkembangan yang berarti.<sup>56</sup> Hasil musyawarah Tim Sungkai Bunga Mayang, bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan BPD kemudian diteruskan ke Pemerintahan Lampung Utara (Selaku Kabupaten Induk) dalam hal ini Bupati Lampung Utara Bpk, Hi. Agung Ilmu Mangku Negara, setelah sebelumnya menyambangi kantor DPRD setempat pada 2 september 2014.

Tim Sungkai Bunga Mayangpun telah menyiapkan lokasi perkantoran dimana tanah atau lahan perkantoran calon Kabupaten didapatkan dari hibah masyarakat. Adapun tempat lokasi perkantoran bertempat di Dusun Bangun

---

<sup>54</sup>Hi. Hidayat Lembasi, Ketua Tim Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, wawancara pribadi (27 April 2018)

<sup>55</sup>Agus Sulistio, Gelar Suntan Puncak Negara, Tokoh Masyarakat Sungkai, Wawancara pribadi (Pada 10 mei 2018)

<sup>56</sup>Erwinto, S.Ag, M.Kom.i., Sekertaris Tim 9 Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Wawancara pribadi (Pada tanggal 26 april 2018)

Mulyo desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan dengan luas 40 hektar.<sup>57</sup> Adapun batas-batas tanah perkantoran tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Desa Bumi Ratu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tulung Mas Lunik
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Desa Labuhan Ratu Pasar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Way Tulung Mas Lunik

Adapun perkembangan setelah usulan pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, dimana pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini Bupati, telah menindak lanjuti usulan aspirasi masyarakat melalui Tim SBM, selanjutnya bupati membentuk Tim Pemekaran Sungkai Bunga Mayang (Tim pengkaji) yang dibentuk melalui surat keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/83/01-LU-HK/2015 tertanggal 21 januari 2015, tentang tim pengkaji pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang Tahun Anggaran 2015. Tujuan tim tersebut adalah membuat rencana kerja pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang.

Kemudian pada Desember 2016 telah disepakati pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD Lampung Utara mengenai usulan pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang. Kemudian setelah disetujui dengan di Paripurnakan oleh DPRD Lampung Utara, maka selesailah syarat administratif kabupaten karna sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD.

---

<sup>57</sup>Erwinto, S.Ag, M.Kom.i., Sekertaris Tim 9 Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Wawancara pribadi (Pada tanggal 26 april 2018)

Usulan pembentukan kabupaten Sungkai Bunga Mayang tidak berakhir hanya di kabupaten saja, dimana berkas usulan Sungkai Bunga Mayang di teruskan ke meja Provinsi dimana berkas tersebut diserahkan langsung oleh Asisten I bidang pemerintahan Yuzar.SH.MAP., yang mewakili pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, kepada pemerintah Provinsi Lampung, yang pada kesempatan tersebut diterima oleh kepala Biro pemerintahan dan Otda Provinsi Lampung Chandri. SH., yang disaksikan oleh Tim panitia Sungkai Bunga Mayang dan Tokoh Masyarakat.

Yang perlu juga diketahui sampai saat ini Pemerintah Republik Indonesia masih Memeratorium atau pemberhentian sementara, akan tetapi bukan berarti berkas ini tidak kita teruskan, tergantung keinginan Pemerintah Pusat merespon atau tidak wacana yang kita ajukan, dan ini bukan dilampung saja, se-Indonesia hampir kasusnya sama, ada pemekaran kabupaten, ada pemekaran Provinsi dan pemekaran kota.

Pada saat ini Dokumen berkas usulan pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang Masih mandeg dikarenakan aturan pemerintah yang belum mengganti PP 78 akibat berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah harus ada aturan mainnya ialah yang masih rencana peraturan pemerintah pusat dan juga pemerintah Republik Indonesia masih Memeratorium atau pemberhentian sementara.<sup>58</sup> Jika kita melihat aturan main Undang-Undang 23 tahun 2014, maka baik secara administratif dan fisik kewilayahan Sungkai

---

<sup>58</sup>Hi. Hidayat Lembasi, Ketua Tim Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, wawancara pribadi (27 April 2018)

Bunga Mayang sudah layak untuk di mekarkan menjadi Kabupaten, namun karna masalah yang disebutkan diataslah yang menyebabkan belum adanya perkembangan mengenai usulan pemekaran ini. Nah ini yang kita tunggu mudah-mudahan dalam waktu singkat, yang ditunggu masyarakat bisa segera dikeluarkan dan pemerintah Republik Indonesia memperbolehkan kembali adanya Daerah Otonomi Baru, serta menjadi tolak ukur atau dasar kita melangkah lebih lanjut.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMEKARAN WILAYAH SUNKAI BUNGA MAYANG**

#### **A. Penilaian Berdasarkan Syarat Administratif**

Berdasarkan tata cara urutan persyaratan administratif, untuk Daerah Kabupaten atau Kota meliputi :

- 1). Keputusan Musyawarah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2). Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan Bupati/Walikota Daerah induk, dan
- 3). Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan gubernur dari Daerah Provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Pembentukan Daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, atau DPD Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayah dan persyaratan administratif. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayah dan persyaratan administratif. Hasil penilaian disampaikan kepada DPR RI dan DPD RI.

Dalam rangka usulan pembentukan Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang meliputi 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 85 (delapan puluh lima) desa, penulis telah

menganalisis salah satu persyaratan administratif yaitu keputusan musyawarah desa dengan hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa	No Keputusan	Ket
1	Sungkai Selatan	1. Sirna Galih 2. Kota Agung 3. Gunung Labuhan 4. Gedung Ktapang 5. Sidodadi 6. Bumi Ratu 7. Ketapang 8. Labuhan Ratu Pasar 9. Labuhan Kampung 10. Banjar Ketapang 11. Karang Rejo	1. 03/BPD-SG/SS/VI/2014 2. 02/BPD-KA/SS/VI/2014 3. 03/BPD-GL/SS/VI/2014 4. 05/BPD-GD.KTP/SS/VI/2014 5. 03/BPD-SDD/SS/VI/2014 6. 03/BPD-BR/SS/VI/2014 7. 03/BPD-KTP/SS/VI/2014 8. 03/BPD-LBP/SS/VI/2014 9. 03/BPD-LBK/SS/VI/2014 10. 02/BPD-BJ.KTP/SS/VI/2014 11. 04/BPD-KRJ/SS/VI/2014	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju 9. Setuju 10. Setuju 11. Setuju
2	Sungkai Barat	1. Gunung Maknibai 2. Cahaya Mas 3. Way Isem 4. Comok Sinar 5. Negribatin Jaya 6. Tanjung Jaya 7. Gunung Raja 8. Sinar Harapan 9. Negeri Sakti 10. Kubu Hitu	1. 04/BPD-GM/SB/VI/2014 2. 03/BPD-CMS/SB/VI/2014 3. 02/BPD-WI/SB/VI/2014 4. 03/BPD-CSI/SB/VI/2014 5. 05/BPD-NJ/SB/VI/2014 6. 04/BPD-TJ/SB/VI/2014 7. 02/BPD-GR/SB/VI/2014 8. 03/BPD-SH/SB/VI/2014 9. 02/BPD-	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju 9. Setuju

			NS/SB/VI/2014 10. 05/BPD- KH/SB/VI/2014	10. Setuju
3	Sungkai Jaya	1. Cahaya Makmur 2. Cempaka Barat 3. Cempaka Timur 4. Lembang Tengah 5. Suku Jaya 6. Sri Agung 7. Sri Jaya 8. Negara Agung 9. Cempaka	1. 03/BPD- CM/SJ/VI/2014 2. 03/BPD- CB/SJ/VI/2014 3. 04/BPD- CT/SJ/VI/2014 4. 03/BPD- LT/SJ/VI/2014 5. 04/BPD- SJ/SJ/VI/2014 6. 03/BPD- SA/SJ/VI/2014 7. 03/BPD- SJ/SJ/VI/2014 8. 04/BPD- NA/SJ/VI/2014 9. 04/BPD- CPK/SJ/VI/2014	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju 9. Setuju
4	Sungkai Tengah	1. Ratu Jaya 2. Mekar Asri 3. Melungun Ratu 4. Negara Bumi 5. Papang Tangguk 6. Negeri Galih Rejo 7. Campang Jaya 8. Batu Nangkop	1. 03/BPD- RJ/ST/VI/2014 2. 04/BPD- MA/ST/VI/2014 3. 02/BPD- MR/ST/VI/2014 4. 03/BPD- NB/ST/VI/2014 5. 04/BPD- PPT/ST/VI/2014 6. 03/BPD- NGR/ST/VI/2014 7. 03/BPD- CJ/ST/VI/2014 8. 04/BPD- BTN/ST/VI/2014	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju
5	Sungkai Utara	1. Hanakau Jaya 2. Negara Batin	1. 03/BPD- HNJ/SU/VI/2014 2. 03/BPD- NB/SU/VI/2014	1. Setuju 2. Setuju



		3. Gedung Batin 4. Ogan Jaya 5. Padang Ratu 6. Kota Negara 7. Kota Negara Ilir 8. Batu Raja 9. Baru Raharja 10. Bangun Jaya 11. Negararatu 12. Negara Batin II 13. Negerisakti 14. Negeriratu 15. Ciamis	3. 03/BPD-GB/SU/VI/2014 4. 03/BPD-OGJ/SU/VI/2014 5. 03/BPD-PDR/SU/VI/2014 6. 03/BPD-KNR/SU/VI/2014 7. 03/BPD-KTRI/SU/VI/2014 8. 05/BPD-BTR/SU/VI/2014 9. 03/BPD-BR/SU/VI/2014 10. 05/BPD-BJ/SU/VI/2014 11. 03/BPD-NRR/SU/VI/2014 12. 03/BPD-NBII/SU/VI/2014 13. 05/BPD-NRS/SU/VI/2014 14. 03/BPD-NR/SU/VI/2014 15. 05/BPD-CM/SU/VI/2014	3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju 9. Setuju 10. Setuju 11. Setuju 12. Setuju 13. Setuju 14. Setuju 15. Setuju
6	Hulu Sungkai	1. Ibul Jaya 2. Gedung Makrifat 3. Lubuk Rukam 4. Bunglai Tengah 5. Beringin Jaya 6. Negara Kemakmuran 7. Gedung Negara 8. Tanjung	1. 04/BPD-IBJ/HS/VI/2014 2. 03/BPD-GDM/HS/VI/2014 3. 05/BPD-LR/HS/VI/2014 4. 05/BPD-BLT/HS/VI/2014 5. 04/BPD-BJ/HS/VI/2014 6. 05/BPD-NM/HS/VI/2014 7. 04/BPD-	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju

		Harapan 9. Gedung Raja 10. Tulung Buyut	GN/HS/VI/201 4 8. 05/BPD- TH/HS/VI/2014 9. 03/BPD- GR/HS/VI/2014 10. 03/BPD- TLB/HS/VI/201 4	8. Setuju 9. Setuju 10. Setuju
7	Bunga Mayang	1. Mulyo Rejo I 2. Mulyo Rejo II 3. Sukadana Ilir 4. Kotanapal 5. Negara Tulang Bawag 6. Sukadana Udik 7. TB Baru 8. Suka Maju 9. Haduyang Ratu 10. Tanah Abang 11. Iso Rejo	1. 03/BPD- MR1/BM/VI/201 4 2. 03/BPD- MR1I/BM/VI/201 4 3. 04/BPD- SI/BM/VI/2014 4. 03/BPD- KL/BM/VI/2014 5. 03/BPD- NTB/BM/VI/201 4 6. 04/BPD- SU/BM/VI/2014 7. 04/BPD- TBB/BM/VI/201 4 8. 04/BPD- SM/BM/VI/2014 9. 03/BPD- HBR/BM/VI/201 4 10. 03/BPD- TB/BM/VI/201 4 11. 03/BPD- IR/BM/VI/2014	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju 6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju 9. Setuju 10. Setuju 11. Setuju
8	Muara Sungkai	1. Negeriratu 2. Banjar Ratu 3. Banjar Negri 4. Karang Sakti 5. Sumber Agung 6. Negeri	1. 03/BPD- NR/MS/VI/201 4 2. 02/BPD- BR/MS/VI/201 4 3. 02/BPD- BN/MS/VI/201 4 4. 05/BPD- KRS/MS/VI/20	1. Setuju 2. Setuju 3. Setuju 4. Setuju 5. Setuju

		Ujung Karang 7. Bandar Agung 8. Karang Mulya 9. Pakuon Agung 10. Karang Rejo 11. Karang Sari	14 5. 03/BPD- SA/MS/VI/201 4 6. 05/BPD- NUK/MS/VI/20 14 7. 05/BPD- BA/MS/VI/201 4 8. 05/BPD- KM/MS/VI/201 4 9. 05/BPD- PA/MS/VI/201 4 10.05/BPD- KR/MS/VI/201 4 11.04/BPD- KS/MS/VI/201 4	6. Setuju 7. Setuju 8. Setuju 9. Setuju 10.Setuju 11.Setuju
	<b>8 Kecamatan</b>	<b>85 Desa</b>	<b>85 Keputusan</b>	<b>100% Setuju</b>

Dari hasil musyawarah Desa tersebut, disimpulkan bahwa salah satu persyaratan administratif pembentukan daerah persiapan telah terpenuhi dengan didukung oleh seluruh Desa cakupan wilayah calon Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang 100%

Adapun persyaratan administratifnya berikutnya yaitu persetujuan bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Bupati Lampung Utara, dimana usulan persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang sudah di Paripurnakan pada Desember 2016 lalu.

Setelah persetujuan bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan Bupati Lampung Utara ditanda tangani, peroses selanjutnya adalah pengajuan usulan pembentukan Daerah Persiapan kepada Gubernur

Lampung dan DPRD Provinsi Lampung untuk kemudian ditandatangani persetujuan bersama DPRD Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung dalam rangka usulan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang.

## **B. Penilaian Kelayakan Berdasarkan Fisik Kewilayahan**

Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan fisik kewilayahan. Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi :

### **a. Cakupan wilayah**

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan cakupan wilayah adalah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota. Cakupan wilayah sebagai mana dimaksud meliputi:

- a. Paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi.
- b. Paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan,
- c. Paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota.

Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud

diatas dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Selanjutnya, didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut yang disebutkan bahwa cakupan wilayah daerah persiapan harus memiliki batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan NKRI.

Calon Daerah persiapan hasil pemecahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan pembentukan Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM) terdiri atas 8 (delapan) kecamatan sebagai cakupan wilayahnya. Adapun 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah : Kecamatan Sungkai Selatan, Kecamatan Muara Sungkai, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Sungkai Barat, Kecamatan Sungkai Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kecamatan Hulu Sungkai, dan Kecamatan Sungkai Tengah.

Dengan melihat cakupan wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang mencakup delapan kecamatan, dapat disimpulkan bahwa syarat minimal cakupan wilayah telah terpenuhi (minimal lima kecamatan).

b. Batas wilayah

Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa dalam rangka pemekaran daerah harus ditentukan batas-batas

wilayahnya, dimana batas wilayah tersebut dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.

Sehubungan dengan usulan pemekaran daerah melalui pembentukan daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, yang meliputi 8 (delapan) dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2015 yang lalu Tim Pengkajian Pemekaran Daerah Kabupaten Lampung Utara, bekerjasama dengan Topografi Angkatan Darat Kodam II Sriwijaya dalam rangka melakukan pemetaan, dan penentuan titik koordinat batas.

Survey dan pemetaan batas yang dilakukan Tim Fasilitasi dan TOPDAM II Sriwijaya, menghasilkan peta dasar yang disertai dengan titik koordinat batas ( 102 buah titik koordinat ) untuk 8 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Waykanan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Waykanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dengan melihat peta dasar yang disertai dengan titik koordinat batas untuk 8 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah

calon daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, maka dapat disimpulkan syarat batas wilayah telah terpenuhi.

c. Luas Wilayah Minimal Pemekaran Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 35 ayat (1), Luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. Yang dimaksud dengan “luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah luas rata-rata wilayah pada daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan luas wilayah daerah provinsi terkecil, daerah kabupaten/kota terkecil yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 35 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah” yang mana hingga saat ini peraturan pemerintah yang dimaksud belum juga terbit, maka dalam hal ini formulasi yang ada untuk menghitung luas wilayah minimal belum bisa digunakan, dikarenakan data yang menjadi bahan baku dalam formulasi masih sangat variatif dan perlu dipastikan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan asumsi dan estimasi yang keliru.



Dengan alasan tersebut diatas, maka penulis tidak memberikan estimasi luas wilayah minimal menggunakan formula yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, namun sebagai bahan pertimbangan berikut disajikan data luas wilayah daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dalam tabel :

Tabel luas wilayah Sungkai Bunga Mayang

No	Cakupan Wilayah	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1	Kecamatan Sungkai Selatan	89,65
2	Kecamatan Muara Sungakai	118,69
3	Kecamatan Bunga Mayang	125,76
4	Kecamatan Sungkai Barat	68,96
5	Kecamatan Sungkai Jaya	52,20
6	Kecamatan Sungkai Utara	127,59
7	Kecamatan Hulu Sungkai	92,63
8	Kecamatan Sungkai Tengah	111,60
	<b>Total Luas Wilayah</b>	<b>787,08</b>

Sumber Data; Dokumen Tim kajian Sungkai Bunga Mayang

d. Jumlah Penduduk Minimal Pemekaran Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan. “ jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah jumlah rata-rata penduduk pada Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk daerah provinsi yang paling sedikit, jumlah daerah kabupaten/kota yang paling sedikit yang ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi 2 (dua).

Dikarenakan peraturan pemerintah yang dimaksud belum diterbitkan hingga saat ini, maka penulis dalam melakukan analisis tidak melakukan estimasi dalam menentukan jumlah penduduk minimal. Namun sebagai pertimbangan berikut disajikan data jumlah penduduk terkini:

No	Cakupan Wilayah	Jumlah penduduk (jiwa)
1	Kecamatan Sungkai Selatan	28.874
2	Kecamatan Muara Sungkai	18.607
3	Kecamatan Bunga Mayang	46.481
4	Kecamatan Sungkai Barat	17.719
5	Kecamatan Sungkai Jaya	16.752
6	Kecamatan Sungkai Utara	46.308
7	Kecamatan Hulu Sungkai	19.814
8	Kecamatan Sungkai Tengah	25.402
	<b>Total Luas Wilayah</b>	<b>219.957</b>

Sumber Data; Dokumen Tim kajian Sungkai Bunga Mayang

- e. Batas Usia Minimal Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 (darurat) tahun 1965, juncto Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah kabupaten Lampung Utara dibawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Sedangkan kelahiran Kabupaten Lampung Utara ini, setelah melalui berbagai kajian disepakati jatuh pada tanggal 15 juni 1946, yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 tahun 2002.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran, sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 Km<sup>2</sup> kini tinggal 2.765,63 Km<sup>2</sup>. Pemekaran wilayah pertamakali terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991, sehingga wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan. Pemekaran ketiga, terjadi dengan terbentuknya Kabupaten

Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999. Wilayah Lampung Utara kembali berkurang 6 Kecamatan, wilayah Lampung Utara pada saat itu tinggal 8 Kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 20 tahun 2000, jumlah Kecamatan dimekarkan menjadi 16 Kecamatan, dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu. Kemudian pada tahun 2006, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, sehingga saat ini Wilayah Kabupaten Lampung Utara menjadi 23 Kecamatan.

Mengacu kepada hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa usia masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, telah memenuhi batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah calon Daerah Persiapan hasil pemecahan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 35 ayat (6) , batas usia minimal Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah calon daerah otonomi kabupaten minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. Secara rinci waktu pendirian masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Utara disajikan pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Pendirian	Usia Kecamatan (Tahun)
1	Sungkai Selatan	2 Agustus 1971	45

2	Muara Sungkai	28 September 2000	16
3	Bunga Mayang	28 September 2000	16
4	Sungkai Barat	28 Juni 2006	16
5	Sungkai Jaya	28 juni 2006	16
6	Sungkai Utara	10 November 1971	45
7	Hulu Sungkai	15 Agustus 2006	10
8	Sungkai Tengah	15 Agustus 2006	10

Sumber Data; Dokumen Tim Kajian Sungkai Bunga Mayang

Dengan melihat tabel diatas, usia seluruh Kecamatan Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (8 Kecamatan) berusia diatas 5 tahun. Dengan demikian persyaratan dasar kewilayahan tentang usia minimal cakupan wilayah Daerah Persiapan terpenuhi.

### C. Analisis Fiqh Siyasah

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

*“Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.*

Seperti petikan qaidah diatas bahwa kedudukan Imam terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, artinya seorang pemimpin yang mewakili rakyatnya, jadi setiap keputusan yang akan di tetapkan oleh pemimpin harus di dasarkan pada aspirasi rakyat, sesuai dengan dasar negara Indonesia, dimana Indonesia menganut sitem

Demokrasi, dimana pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, jadi sudah sepantasnya jika seorang pemimpin sebelum menetapkan sesuatu terlebih dahulu melihat keinginan rakyatnya.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

Merujuk pada qaidah di atas bahwa tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, ini mengartikan bahwa setiap keputusan seorang pemimpin harus memberikan kemaslahatan bagi umatnya, seperti halnya pembahasan yang penulis bahas mengenai pemekaran wilayah, dimana dalam pemekaran wilayah biasanya terdapat banyak kemaslahatan dibandingkan kemudaratannya, seperti halnya daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, dimana masyarakat menginginkan pemisahan diri dari kabupaten induk.

Adapun kemaslahatan yang akan terwujud jika aspirasi rakyat ini di tindak lanjuti oleh pemerintah, seperti pemerataan pembangunan pasti terjadi, karna jika suatu daerah terlalu luas maka pemerataan pembangunan akan kurang, karna pemimpin lebih melihat daerah yg dekat dengan kotanya saja sedangkan yang pelosok kurang diperhatikan, begitupun jarak, dimana jika terjadi pemekaran wilayah maka jarak yang akan di tempuh masyarakat ke Pemda, Disdukcapil, Rumah Sakit dan lain sebagainya menjadi lebih dekat, begitupun lapangan pekerjaan apabila terjadi pemekaran maka lapangan pekerjaan akan banyak teredia,

bahkan masyarakat bisa usaha kecil-kecilan seperti halnya jika terjadi pemekaran maka pengusaha asing akan membangun pabrik dan lain sebagainya dan masyarakat bisa memanfaatkan tempat guna berjualan dan masih banyak kemaslahatan yang akan didapat. Jadi sesuai qaidah di atas pemimpin harus bertindak sesuai aspirasi rakyatnya.

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”*

Adapun Qaidah Adh-Dhararu Yuzaluarti qaidah ini adalah suatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Dengan kata lain qaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Adapun yang berkaitan dengan ketentuan Allah, sehingga kerusakan itu menimpa seseorang, kedudukannya menjadi lain, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari keimanan terhadap qadha dan qadarnya Allah SWT, karna segala sesuatu menjadi boleh bagi Allah SWT. Dan dari-Nya lah kemanfaatan.

Yang menjadi tujuan umum bagi syar'i dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan dharuriyah(primer)nya, memenuhi kebutuhan haajiyah (skunder), serta kebutuhan tahsiiniyyah (pelengkap)nya. Adapun pengertian dari ketiga macam kemaslahatan tersebut yaitu :



- 1). Mashlahah Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak memiliki arti bila lenyap salah satu saja dari lima pokok yang mesti dipelihara itu. Segala usaha yang menjamin terpeliharanya lima pokok itu adalah mashlahat dalam tingkat dharuri, karena itu Allah memerintahkan pelaksanaan usaha itu. Setiap hal yang menyebabkan kemusnahan atau kerusakannya adalah keburukan, karena itu Allah melarangnya. Dengan demikian Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- 2). Mashlahah Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia padanya tidak berada pada tingkat dharuri. Ia tidak secara langsung memenuhi kebutuhan dasar lima pokok yang lima tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan qashar shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, di bolehkan jual beli pesanan (bay' al-salam), kerjasama dalam pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqqah). Semua ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar diatas.

3). Mashlahah Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amal tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Mengenai qaidah yang dijelaskan di atas jelas bahwa untuk memperluas suatu wilayah harus memperhatikan maslahatnya bagi umat, jangan dalam mengambil suatu keputusan malah banyak mudharatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada setiap sub Bab, maka dapat ditarik kesimpulan Upya Pemekaran yang dilakukan, baik itu dari Tim Panitia Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat, itu sudah semaksimal mungkin dilakukan sesuai perosedur pemekaran wilayah, baik itu melakukan uji stady kelayakan, mempersiapkan lahan untuk perkantoran, dan upaya-upaya lainnya.

Daerah persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dilihat dari Hukum Positif dalam Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sungkai Bunga Mayang sudah layak untuk di mekarkan karena sesuai perosedur dalam pemekaran wilayah.

Jadi semua persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah, baik dilihat dari persyaratan Administratif, dan fisik kewilayahan sudah memenuhi persyratan hanya saja Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri masih Memeratorium atau pemberhentian sementara dan pemerintah belum mengganti PP 78 akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana harus ada aturan mainnya tetapi masih rencana peraturan pemerintah pusat.

Dalam Fiqh Siyasa perluasan wilayah tidak diatur secara teoritis, hanya saja Pemimpin dalam mengambil keputusan harus di dasari

kemaslahatan umatnya, dalam hal ini Sungkai Bunga Mayang menurut Fiqh Siyasah tidak ada masalah karena semua atas dasar keinginan masyarakat bukan keinginan sekelompok orang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada ;

1. Penulis menyarankan kepada Tim Panitia Sungkai Bunga Mayang, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk terus berjuang guna mewujudkan kabupaten Sungkai Bunga Mayang.
2. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lampung Utara, dan Pejabat Legislatif Untuk terus memperjuangkan usulan Pemekaran Sungkai Bunga Mayang yang telah di teruskan ke Pemerintah Provinsi.
3. Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Provinsi Lampung, untuk menindaklanjuti Berkas Usulan Sungkai Bunga Mayang, sehingga dapat memenuhi tata urutan persyaratan administratif berikutnya.

## DAFTAR FUSTAKA

Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip metode reaserch*, Yogyakarta; Sumbangsih 1975

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: prenada media, 2000

Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka Amani, 2003

Bambang Sugono. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011

Hanif Nurcholis, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2011

Josep Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakrta: Ghalia Indonesia 1985

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, M.A, *Ilmu Ushul fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Dr. Yusnani Hasyim Zoen, SH., M.Hum., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Dokumen Usulan Pembentukan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Lampung Utara, 2017

Dokumen Kajian Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Lampung Utara, 2016

Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara, 2017

Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2017

[http:// Kamus Besar. Com](#), 5 April 2018

[http:// Rubrika Bahasa, Wardapress, com](#), 5 April 2018

[http://Otda Kemendagri, \*Kemendagri Ancam Hapus Daerah Otonomi Yang Gagal\*](#), 5 April 2018

[http:// Minbar, Wardapress. Com, \*Dasar-dasar Hukum Pemekaran\*](#), 23 April 2018

[http:// Daerah Persiapan DOB Kebudayaan](#), 23 April 2018

Amir Syarifudin, *Macam-macam Masalah*, tersedia di [http:// Majelis Penulis. Blogspot.co.id](#) 23 April 2018

[http:// Unpas Hukum. Blogspot. Com](#), 5 April 2018

Wardapress// *Sejarah perluasan wilayah Khulafaur Rasidin*, 23 April 2018

Wawancara dengan Bapak Hidayat Lembasi, Selaku Ketua Tim Panitia Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Pada tanggal 27 April 2018

Wawancara dengan Bapak Erwinto, Selaku Sekertaris Tim Panitia Persiapan Kabupaten Sungkai Bunga Mayang Pada tanggal 26 April 2018

Wawancara dengan Bapak Agus Sulistio, Selaku Tokoh Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, Pada tanggal 10 Mei 201

Wawancara dengan Bapak Welli Defri, Selaku Tokoh Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, Pada tanggal 11 Mei 2018

Wawancara dengan Bapak Abdul Hamit, Selaku Tokoh Masyarakat Sungkai Bunga Mayang, Pada Tanggal 10 Mei 2018

Wawancara dengan Bapak Tjik Aman, Selaku Tokoh Adat, Sungkai Bunga Mayang, pada tanggal 15 Mei 2018

Wawancara Dengan Bapak Tajudin.Br, Selaku Tokoh Adat Sungkai Bunga  
Mayang, Pada Tanggal, 14 Mei 2018

Wawancara dengan Bapak Zainudin, Selaku Tokoh Adat Sungkai Bunga Mayang,  
Pada tanggal 14 Mei 2018

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

